

RISET DAN INOVASI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020-2025

No.	Judul	Abstrak	Tautan Video
A. Kegiatan Riset			
2023			
1.	Masterplan pengembangan rencana strategis sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	Pertanian mempunyai peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, utamanya pada upaya mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luasan yang kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani. Strategis Pertanian adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian melalui pemilihan sektor unggulan sebagai basis pembangunan kawasan perlu mempertimbangkan sumber daya yang ada, multiplier effect, maupun kesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sektor pertanian, perikanan, peternakan masih menjadi sektor ekonomi utama di Kabupaten Indragiri Hulu Hal ini jelas terlihat dari kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku yang mencapai 74,4% pada tahun 2020 (BPS, 2021). Ujian dari kegiatan ini adalah mendapatkan dokumen Masterplan Pengembangan Rencana Strategis Sektor Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hulu.	
2.	Pra FS Kawasan Strategis ekonomi daerah	Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,26 Km ² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut.. Atas dasar pertimbangan luasan wilayah geografis Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dapat menyusun konsep dengan pengembangan kawasan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur prioritas dalam upaya mendorong sentra ekonomi unggulan. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of growth), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan carrying capacity suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Ketersediaan infrastruktur yang efektif dan handal memiliki peranan penting bagi pengembangan kawasan dan merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan unggulan maupun sebagai kawasan strategis kabupaten. Analisis yang digunakan dalam pekerjaan Penyusunan Pra FS Kawasan Strategis Ekonomi ini terdiri dari analisis fisik, kependudukan, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa fungsi sosial, analisa sumber daya alam dan analisa keanekaragaman hayati sebagai penunjang penentuan kawasan strategis ekonomi yang akan dituangkan dalam program pengembangan selama 10 (sepuluh) tahun ke depan. Dari hasil penilaian delapan indikator tersebut di atas, didapatkan bahwa terdapat beberapa kecamatan (selain yang sudah di tetapkan dan RTRW) yang masuk dalam kategori prioritas kawasan strategis ekonomi, yaitu yang memiliki nilai total tertinggi (24, 23, dan 22) sebagai berikut: Kawasan Kuala Cenaku, Kawasan Batang Gansal, Kawasan Peranap.	
3.	Kajian Strategis Cepat Tumbuh	Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) merupakan salah satu dokumen perencanaan pengembangan KSCT di daerah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) ini dapat menjadi pedoman terhadap perencanaan kawasan strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Indragiri Hulu. Metode kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis spasial. Dimana dari hasil proses analisis menggunakan software QGIS dan Arcgis untuk melakukan analisis Kernel Density untuk mengidentifikasi pusat kegiatan kawasan yang memberikan pelayanan terhadap kawasan. Sebelum melakukan analisis Kernel Density Estimation untuk mengidentifikasi pusat kegiatan pelayanan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan BIG Data Google Maps untuk mengumpulkan data sebaran lokasi fasilitas, sarana di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian data berikutnya diambil juga dari data sekunder yang dapat diperoleh pada instansi pemilik data seperti: Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu, BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu serta data pendukung dengan memanfaatkan Google BIG Data. Hasil kajian berupa potensi kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten Indragiri Hulu serta kebijakan dan strategis pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut : potensi kawasan strategis cepat tumbuh perkotaan kecamatan pasir penyui, rengat dan rengat barat, sungai lala, seberida, peranap , batang cenaku, batang gansal, dan potensi kawasan strategis cepat tumbuh ekonomi kecamatan lirik.	
4.	Kajian strategis penanggulangan kemiskinan	Covid 19 yang terjadi akhir-akhir ini berdampak langsung pada kondisi pembangunan di daerah-daerah. Belum berakhir Covid 19, masuk lagi masa resesi ekonomi terutama pada Tahun 2022 sampai saat ini. Hal ini menjadi tantangan besar terutama terkait 2 hal yakni menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya harga-harga.. Sebagai salah satu kabupaten yang hasil sektor perkebunannya dominan berorientasi ekspor. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (growth with equity) masyarakat, stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Bagi kabupaten/kota yang sangat concern terhadap pembangunan manusia selama proses pembangunan di masing-masing daerah, perbaikan indeks mutu manusia tentunya merupakan titik yang tulus, sekaligus memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat di daerah, dan menjadikan model bangsa dalam proses pembangunan jangka panjang. Kemiskinan merupakan salah satu masalah dari sekian masalah yang ada di negri ini. Berbagai upaya di lakukan oleh pemerintah dan elemen masyarakat agar masalah kemiskinan dapat tertasi. Upaya yang telah di lakukan dalam mengurangi angka kemiskinan selama ini antara lain melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian pemberian dana bergulir, pembangunan, sarana dan prasarana dan pedampingan. Hasil dari kajian ini adalah sukses atau tidaknya Rencana induk penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada kemampuan mengimplementasikan setiap program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi, melainkan juga terletak pada kemampuan pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak yang menjadi stakeholder dalam kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan.	
5.	Kajian Peningkatan pelayanan dasar persampahan	Meningkatnya tingkat populasi, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi yang cepat dan kenaikan standar hidup masyarakat telah mempercepat adanya penumpukan sampah. Sampah adalah masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat karena sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai. Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan 1 manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara formal merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari kajian ini adalah. Semakin terjaminnya hak masyarakat menerima suatu pelayanan dasar dan pemerintah daerah dengan mutu tertentu dan Menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah. Hasil dari kajian ini Agar pengelolaan sampah sukses, maka tidak hanya dilakukan oleh satuan kerja terkait, namun harus memposisikan rumah tangga sebagai aktor utama pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah harus siap dengan regulasi yang mendukung model partisipatif ini.	
6.	Kajian pengembangan inovasi daerah	Salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan pemerintah dapat terselenggara dengan lebih efisien, cepat dan efektif. Dalam melaksanakan tugas otonomi, pemerintah daerah harus mampu melakukan terobosan, berinovasi, memanfaatkan potensi daerah, dan selalu mengikuti tren perkembangan teknologi. Inovasi memiliki makna kebaruan, yang berkaitan dengan sesuatu yang baru bagi orang, organisasi, masyarakat, atau situasi tertentu. Inovasi sendiri melibatkan pengembangan dan penerapan hal-hal baru. Landasan hukum inovasi daerah tertuang dalam Bab 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 386-390 (5) inovasi daerah, yang memuat tujuan inovasi; asas; tindakan inovasi; asas, jenis, tata cara, dan cara pelaksanaannya. ;dan penilaian dan penghargaan inovasi. Landasan hukum inovasi daerah tertuang dalam Bab 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 386-390 (5) inovasi daerah, yang memuat tujuan inovasi; asas; tindakan inovasi; asas, jenis, tata cara, dan cara pelaksanaannya. ;dan penilaian dan penghargaan inovasi. Pengembangan dan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023 bertujuan menjadi pedoman untuk peningkatan kematangan, penguatan sistem inovasi daerah dan daya saing daerah yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan. Hasilnya dapat menguraikan tentang berbagai strategi berdasarkan SWOT dan kebijakan yang dihasilkan untuk menentukan fokus penguatan untuk mencapai SiDa Kabupaten Indragiri Hulu yang matang dan kuat serta daya saing yang tinggi	
7.	Kajian Peningkatan pelayanan dasar air limbah domestik	Meningkatnya jumlah penduduk di wilayah perkotaan mengakibatkan kegiatan manusia juga meningkat, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan juga akan meningkat. Kegiatan manusia yang terjadi dapat menimbulkan berbagai macam gejala yang bersifat negatif, diantaranya adalah air limbah yang dapat mencemari lingkungan baik itu air, udara, dan tanah yang akan menurunkan kualitas lingkungan hidup di perkotaan. Air merupakan kebutuhan pokok di dalam kehidupan manusia. Mendukung misi RPJMN 2020-204 menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs, dan mencapai target Provinsi Riau tahun 2024 di sektor air limbah yaitu 90% akses layak layanan limbah bagi masyarakat, termasuk 11% akses aman dengan terkelolanya limbah rumah tangga di masyarakat dan 0% sebaran buang air besar sembarangan maka perlu adanya "Kajian Peningkatan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik di Kabupaten Indragiri Hulu" tujuan dari kegiatan ini adalah antara lain menyusun strategi Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik guna Mencapai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien, dan efektif. Hasil kajian peningkatan pelayanan dasar air limbah domestik di Kabupaten Indragiri Hulu adalah, peraturan terkait pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Indragiri Hulu saat ini sudah memadai, kecuali Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik yang belum ada. Keberadaan lembaga pengelola Air Limbah Domestik di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu masih terbatas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan, Pemerintah belum bisa memaksimalkan keberadaan infrastruktur SPALD-Terpusat seperti IPAL Komunal dan MCK++, Belum adanya penganggaran yang terintegrasi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.	
8.	Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah (Jakstrada) Bidang Air Minum Di Kabupaten Indragiri Hulu	Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman pada kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Penyelenggaraan SPAM dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan maka perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (JAKSTRADASPAM) Kabupaten Indragiri Hulu yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM yang berkualitas. Tujuan dan manfaat Jakstrada SPAM yakni untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM di daerah. Selain itu sebagai arah penyelenggaraan SPAM serta strategi pencapaiannya.	

9.	Kajian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan, Peningkatan dan Penanganan Drainase Berbasis Database di Kabupaten Indragiri Hulu	Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Maksud dilaksanakannya penyusunan dokumen Rencana Pembangunan, Peningkatan dan Penanganan Drainase Berbasis Database Drainase di Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan target drainase dalam kondisi baik sesuai RPJMD dengan mensinergikan seluruh stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1. Menginventarisir drainase eksisting sesuai database drainase; 2. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, peningkatan dan penanganan drainase; dan 3. Memetakan kewenangan pengelolaan drainase dan mensinergikan pelaksanaannya terhadap seluruh stakeholder terkait.	
2024			
1.	Kajian Penanganan Banjir dan Genangan Kabupaten Indragiri Hulu	Banjir telah menjadi permasalahan yang hampir rutin dihadapi oleh beberapa kota besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang berada di pesisir dan terletak dalam daerah aliran sungai yang besar. Terjadinya banjir ini juga disebabkan oleh 3 permasalahan utama yaitu fenomena alam, kondisi alam, dan aktivitas manusia. Untuk fenomena alam sendiri meliputi hujan setempat, debit DAS hulu, pasang surut air laut, dan gejala penurunan elevasi tanah (land subsidence). Sedangkan permasalahan kondisi alam meliputi geografis, topografi, perubahan dimensi sungai, penyempitan, slope, meandering, pendangkalan karena sedimentasi, back water (dalam istilah lokal sering disebut rob) pasang surut. permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu karena pengelolaan operasionalisasi dan pemeliharaan (OP) yang tidak memadai termasuk dalam kegiatanartificial yang dapat mengantisipasi sesaat (seperti stasiun pompa), perubahan tata ruang, tata gunalahan dan pemanfaatan lahan. Tujuan dari pekerjaan Kajian Penanganan Banjir dan Genangan Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk Mengkaji kinerja sistem drainase perkotaan yang dapat mengatasi permasalahan banjir serta memberikan acuan rekomendasi bagi penataan ruang di wilayah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek potensi dan daya lingkungan dan Mengetahui gambaran/diskripsi sistem drainase perkotaan yang menyebabkan genangan di wilayah ruas jalan potensi banjir. Berdasarkan hasil analisa mengenai penanganan banjir dan genangan di Kab. Indragiri Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut: Penebangan Hutan di wilayah hulu (konservasi), pengundulan lahan tanpa perencanaan dan pengawasan, Erosi tanah di daerah hulu menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi di daerah tengah dan hilir, menyebabkan pendangkalan sungai karena luasan penampang bertambah kecil, yang padaakhirnya menyebabkan air sungai meluap melebihi kapasitas dan mengakibatkan banjir. Alih fungsi resapan air menjadi lahan permukiman, karena pertumbuhan penduduk tidak terkendali menyebabkan peningkatan eksploitasi ruang dan sumber daya air. Pencemaran limbah domestik: sampah rumah tangga, kotoran manusia, sampah pertanian dan peternakan, limbah industri, bahan kimia, B3.	
2.	Kajian Pengembangan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu	Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu suatu bentuk pembangunan yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Maksud Kajian Pengembangan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk menyajikan konsep pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah sebagai dasarpenyusunan program pembangunan dan diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu di masa yang akan datang. Hasil kajian Pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah, Diperlukan pengintegrasian wawasan lingkungan yang meliputi aspek keberlanjutan (sosial, ekonomi, dan lingkungan) ke dalam kebijakan spasial dan sektoral, Diperlukan pengembangan ekonomi hijau yang akan tertuang dalam wujud regulasi daerah sebagai upaya pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan berlandaskan asas keadilan,kelestarian dan keberlanjutan, partisipatif, kearifan lokal, pemerintahan yang baik, dan kesejahteraan masyarakat, Diperlukan komitmen bersama, baik oleh pemerintah, swasta, masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan di kabupaten Indragiri Hulu, Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan di kabupaten Indragiri Hulu, Merumuskan kembali kebijakan sektoral yang belum memuat aspek wawasan lingkungan dalam bentuk , strategi dan indikasi program serta konsep-konsep keberlanjutan sesuai dengan dinamika pembangunan dan kebijakan.	
3.	Kajian Penyusunan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategis yang perlu dilakukan yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada konsumen. Produk unggulan daerah berupa produk barang ataupun jasa yang ditawarkan di pasaran saat ini sangat beragam. Perkembangan teknologi berakibat pada munculnya toko-toko online pada media sosial maupun pada pasar konvensional, sehingga mendapatkan tantangan tersendiri bagi para wirausaha dan UMKM di daerah yang akan memasarkan produknya secara online atau secara konvensional. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dalam bentuk undang-undang otonomi daerah. Sehingga daerah mempunyai kekuasaan yang lebih besar terutama kabupaten dan kota. Maka daerah dapat berkembang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan dapat dilihat dari industri produk unggulan di wilayah tersebut. Produk Unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan secara global. Tujuan kajian penyusunan pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
4.	Kajian Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hulu	Beberapa dekade terakhir, konsep "Pembangunan Manusia" telah diintegrasikan ke dalam paradigma pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks pembangunan manusia, pembangunan ini dianggap sebagai tujuan utama dan akhir dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu telah mengikuti konsep Pembangunan Manusia dengan mengukur keberhasilannya melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator utama. Pengukuran IPM bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemajuan pembangunan manusia. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran standar yang dapat digunakan secara internasional. IPM terdiri dari empat komponen indikator yaitu : Angka harapan hidup, Harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah, dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Maksud dari penyusunan Kajian Peningkatan IPM Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 ini adalah untuk menyajikan informasi terkait IPM guna mendukung peningkatan pembangunan daerah, serta menyediakan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara keseluruhan besarnya capaian IPM Kabupaten Indragiri Hulu cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016-2023. Namun pada 2020 terjadi penurunan nilai IPM akibat pandemic COVID-19.	
5.	Masterplan Ekonomi Kreatif	Pemerintah menyadari bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu bagian dari pilar ekonomi nasional, yang menjadi harapan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia secara menyeluruh dalam rangka menghadapi ekonomi global dan regional. Perkembangan Ekonomi kreatif merupakan sektor yang menjadi kekuatan baru ekonomi di Indonesia, dan menjadi sektor penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mengembangkan peluang ekonomi kreatif yang berpotensi di daerah guna lebih meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Saat ini ekonomi kreatif di Kabupaten Indragiri Hulu lebih unggul dalam subsektor yang bersifat non digital, seperti sektor kerajinan, seni, dan kuliner. Sasaran produk yang diharapkan dari hasil pekerjaan ini adalah: 1. Teridentifikasinya sektor ekonomi kreatif unggulan dan berpotensi untuk ditetapkan sebagai fokus pengembangan ekonomi kreatif. 2. Terumuskannya pedoman operasional pembuatan kebijakan bagi pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif. 3. Terumuskannya rencana tindak arahan dan rujukan bagi pelaku industri, baik pengusaha, dan institusi lainnya yang bergerak di bidang industri kreatif ataupun bidang lain yang berkaitan. Berdasarkan hasil temuan temuan dalam materplan ekonomi kreatif di Kabupaten Indragiri Hulu, telah menunjukkan potensi besar yang dimiliki sektor ekonomi kreatif di wilayah ini, khususnya pada sektor kuliner dan kriya.	
6.	Kajian Analisis Penerapan SPM Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Standar pelayanan minimal (SPM), adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal. Untuk mengetahui apakah perangkat daerah/unit kerja sudah memenuhi SPM, maka di perlukan suatu indikator . indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengambar besaran sasaran yang hendak di penuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu , berupa masukan, proses, hasil atau manfaat pelayanan. SPM adalah hak semua individu. Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya UU NO. 23 TAHUN 2014 tentang pemerintahan daerah mengamatakan hal tersebut. Bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintah dan menjadi prioritas anggaran perintah. Berdasarkan UUD NO. 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum , perumahan rakyat , ketentraman, ketertiban dan social. Tujuan kajian dari analisis SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan di kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai alat koordinasi dalam penerpan dan pencapaian SPM, sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran penyusunan rencana tahunan penerapan SPM, sebagai pedoman monitoring dan penerapan SPM, sebagai pedoman pelaporan penerapan SPM. Sebagai pedoman monitoring dan evaluasi penerapan SPM, Sebagai pedoman pelaporan penerapan SPM dan memberikan umpan balik serta rekomendasi bagi rencana penyusunan rencana aksi. Laporan hasil akhir SPM adalah, SPM layanan air minum sudah melayani 56.352 rumah, SPM pengolahan air limbah sebesar 52.585,	
7.	Kajian Pengembangan Strategi Pembiayaan Berkelanjutan Jangka Panjang untuk Infrastruktur Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hulu	Kebutuhan pembangunan yang lingkupnya luas dan kebutuhan pembiayaannya besar tentunya merupakan tantangan bagi Pemerintah terutama dikarenakan tuntutan untuk melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan. Tantangan tersebut melahirkan alternatif dalam pengadaan pembiayaan pembangunan. salah satu alternatifnya adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta. Di Kabupaten Indragiri Hulu, salah satu sektor yang masih memerlukan pengembangan adalah sektor infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan tidak hanya kemampuan keuangan Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu, melainkan juga membutuhkan peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur sehingga terjadi sinergi yang baik dalam upaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut. Di Indonesia Pengaturan kerjasama Pemerintah Swasta tertuang dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam konteks Kabupaten Indragiri Hulu, tentunya perlu dikaji kerjasama pemerintah-swasta seperti apa yang tepat diterapkan, mencakup strategi, model, tingkat resiko pembiayaan daerah melalui Public Private partnership dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Tujuan Kajian Pengembangan Strategi Pembiayaan Berkelanjutan Jangka Panjang Untuk Infrastruktur Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hulu adalah Teridentifikasinya kondisi eksisting pembangunan, Menyajikan analisis dan pembahasan pengembangan strategi, analisa evaluatif sekaligus menjadi rujukan kebijakan Pemerintah dan Sebagai bahan monitoring, evaluasi dan masukan bagi Pemerintah.	

8.	Pendampingan Pemetaan Guna Bangunan Eksisting sebagai data pendukung perencanaan fisik dan sarana prasarana di perkotaan Rengat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu melalui bidang Fisik dan Sarana Prasarana berperan sebagai penjamin ketersediaan sarana prasarana dasar dan penunjang aktifitas di Kabupaten Indragiri Hulu terlebih di kasasan perkotaan. Setiap perencanaan sarana dan prasarana akan berkaitan erat dengan ketersediaan lahan dan aktifitas serta bangunan eksisting yang ada disekitaran Kawasan terkait. Terkait dengan perencanaan dan ketersediaan lahan, melalui kementerian ATR/BPN dalam hal ini telah memberikan intruksi kepada Kepala Daerah se-Indonesia melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor TR.02/02/36-200/II/2021 perihal Penyiapan Database Untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/ Kota agar Kepala daerah seluruh Indonesia untuk dapat membangun dan menyiapkan database guna keperluan RDTR dan dapat diintegrasikan dalam sistem online atau digital. Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043 arahan indikasi program prioritas yaitu, RDTR Perkotaan Rengat sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Anggaran pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui bidan Fisik dan Sarana Prasarana BAPPEDA akan melakukan perekutan Konsulten Individual Pemetaan Guna Bangunan Eksisting di Perkotaan Rengat. Tujuan dari kegiatan ini adalah, Memproleh gambaran guna bangunan eksisting di perkotaan Rengat, Mempermudah dalam analisis kebutuhan fisik dan sarana prasarana dasar dan penunjang aktifitas masyarakat perkotaan Rengat, Salah satu data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan dokumen RDTR Perkotaan Rengat. Hasil kajian yang telah dilakukan bahwa jumlah bangunan eksisting di perkotaan Rengat sebanyak 22.387 unit bangunan yang terbagi dalam 13 jenis bangunan.	
9.	Pendampingan Pemetaan Guna Bangunan Eksisting ssebagai data pendukung perencanaan fisik dan sarana prasarana di perkotaan Air Molek	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu melalui bidang Fisik dan Sarana Prasarana berperan sebagai penjamin ketersediaan sarana prasarana dasar dan penunjang aktifitas di Kabupaten Indragiri Hulu terlebih di kasasan perkotaan. Setiap perencanaan sarana dan prasarana akan berkaitan erat dengan ketersediaan lahan dan aktifitas serta bangunan eksisting yang ada disekitaran Kawasan terkait. Terkait dengan perencanaan dan ketersediaan lahan, Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043 arahan indikasi program prioritas yaitu, RDTR Perkotaan Air Molek sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pada anggaran tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui bidan Fisik dan Sarana Prasarana BAPPEDA akan melakukan perekutan Konsulten Individual Pemetaan Guna Bangunan Eksisting di Perkotaan Air Molek. Tujuan, Memproleh gambaran guna bangunan eksisting di perkotaan Rengat, Mempermudah dalam analisis kebutuhan fisik dan sarana prasarana dasar dan penunjang aktifitas masyarakat perkotaan Air Molek, Salah satu data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan dokumen RDTR Perkotaan Air Molek. Hasil dari survey yang dilakukan bahwa jumlah bangunan eksisting di perkotaan Air Molek adalah, 13.559 unit. Yang terbagi menjadi 13 jenis bangunan.	
10.	Penyusunan Database Prasarana Pkl Peranap	Acuan utama dalam pendataan jaringan prasarana ini adalah pada kebutuhan database prasarana dan sarana struktur ruang RDTR sesuai Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Basis Data dan Penyajian Peta RTRW/RDTR. Penyusunan database ini sesuai dengan surat edaran direktorat jenderal tata ruang Nomor TR.02/02/36-200/II/2021 perihal penyiapan database untuk rencana detail tata ruang [RDTR] Kabupaten/Kota agar Kepala daerah seluruh Indonesia dapat menyiapkan database guna keperluan RDTR dalam rangka memudahkan proses penyediaan dokumen RDTR dan dapat diintegrasikan dalam sistem online atau digital. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan identifikasi jaringan prasarana mengacu pada kebutuhan bidang fisik prasarana dan sarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Substansi RDTR, menyusun informasi dan database baru terkait jaringan prasarana dan menyiapkan album peta lengkap denagan file shp database jaringan prasarana yang sinkron dengan kebutuhan RDTR. Dalam penyusunan data, penyusunan database prasarana perkotaan di Pusat Kegiatan Lingkungan [PKL] Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, metode pengolahan data menggunakan metode analisis spasial dengan teknik digitasi dan input data spasial. Proses digitasi dapat dilakukan dengan secara langsung mendigitasi citra satelit yang telah dilakukan koreksi dan georeferensing yang sesuai dengan posisi datum wilayah kajian dengan menggunakan software ArcGis sehingga menghasilkan data dalam format file [shp]. Dari hasil survey dan data sekunder didapatkan bahwa jumlah sarana yang dimiliki di perkotaan peranap sebanyak 99 unit sarana yang terbagi dalam 6 jenis sarana yang ada di perkotaan peranap, sedangkan untuk jaringan prasarana yang dimiliki di perkotaan peranap cukup bervariasi dengan total keseluruhan panjang jaringan prasarana tercatat sepanjang 405.051.32 m yang terbagi dalam 7 jenis prasarana yang ada di perkotaan peranap.	
11.	Penyusunan Database Prasarana Pkl Seberida	Acuan utama dalam pendataan jaringan prasarana ini adalah pada kebutuhan database prasarana dan sarana struktur ruang RDTR sesuai Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Basis Data dan Penyajian Peta RTRW/RDTR. Penyusunan database ini sesuai dengan surat edaran direktorat jenderal tata ruang Nomor TR.02/02/36-200/II/2021 perihal penyiapan database untuk rencana detail tata ruang [RDTR] Kabupaten/Kota agar Kepala daerah seluruh Indonesia dapat menyiapkan database guna keperluan RDTR dalam rangka memudahkan proses penyediaan dokumen RDTR dan dapat diintegrasikan dalam sistem online atau digital. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan identifikasi jaringan prasarana mengacu pada kebutuhan bidang fisik prasarana dan sarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Substansi RDTR, menyusun informasi dan database baru terkait jaringan prasarana dan menyiapkan album peta lengkap denagan file shp database jaringan prasarana yang sinkron dengan kebutuhan RDTR. Dalam penyusunan data, penyusunan database prasarana perkotaan di pusat kegiatan lingkungan [PKL] seberida Kabupaten Indragiri Hulu, metode pengolahan data menggunakan metode analisis spasial dengan teknik digitasi dan input data spsial. Proses digitasi dapat dilakukan dengan secara langsung mendigitasi citra satelit yang telah dilakukan koreksi dan georeferensing yang sesuai dengan posisi datum wilayah kajian dengan menggunakan software ArcGis sehingga menghasilkan data dalam format file [shp] data atau objek yang di digitasi. Berdasarkan hasil pembahasan di dapati bahwa jumlah sarana yang dimiliki di perkotaan seberida sebanyak 136 unit sarana yang terbagi dalam 8 jenis yang ada di perkotaan seberida sedangkan untuk jaringan prasarana yang dimiliki di perkotaan seberida diperoleh dengan total keseluruhan panjang jaringan prasarana tercatat 526.642.56 meter yang terbagi dalam 7 jenis prasarana yang ada di perkotaan seberida.	
B. Inovasi			
2021			
1	SI-ATAN	Dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah secara berkelanjutan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Untuk memenuhi agenda reformasi dan menciptakan kondisi yang demikian, perlu adanya suatu pranata yang terukur yaitu melakukan reformasi birokrasi dan diperlukan capaian kinerja yang komprehensif dan akuntabel. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri membuat Aplikasi Sistem Aduan Ketertaman dan Ketertiban Umum (SI-ATAN) (untuk menampung aduan masyarakat dalam penyelesaian gangguan Keamanan Ketertaman dan Ketertiban Masyarakat (Kantantibmas) yang digagas pada tahun 2018 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun Manfaat dibuatnya Aplikasi SI-ATAN ini sebagai bahan masukan program pengembangan Inovasi dibidang sektor publik. Aplikasi SIATAN juga diharapkan mendukung Tupoksi (Tugas dan Fungsi) Satpol pp dalam penyelenggaraan penegakan perda, penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan cermat.	
2	Satgas covid 19 satpol pp kab.inhu	Sesuai dengan Pasal 5 huruf b Jo Pasal II huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa tugas dan fungsi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat yang salah satunya meliputi kegiatan Patroli. Bahwa sesuai dengan SK Bupati Nomor Kpts. 184/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Indragiri Hulu Satuan Polisi Pamong Praja diberikan tugas tambahan untuk melakukan Pencegahan dan penindakan terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga mekanisme patroli yang Satpol-PP lakukan dibedakan antara Patroli Traniturn dan Patroli Penanganan Covid-19. Tujuan Inovasi ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yaitu: 1. Memakai masker 2. Mencuci tangan 3. Menghindari Kerumunan 4. Mengatur Jarak 5. Menghindari untuk mobilisasi (bergerak) Manfaat inovasi ini yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan	
3	Aplikasi SI-DINA	Pelaporan Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah merupakan cerminan dari cepat atau lambatnya dalam pelaporan pengelolaan yang dihasilkan terutama di era perkembangan teknologi pada saat ini Dalam pembuatan laporan pengelolaan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya masih menggunakan laporan secara excel dan belum menggunakan aplikasi sehingga Pelaporan Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah cenderung lambat, data yang dihasilkan tidak akurat, membutuhkan tenaga, waktu dan SDM yang besar. Hal ini menunjukkan hasil Pelaporan Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah yang tidak efektif dan efisien sehingga hal-hal tersebut menjadi dasar pembuatan sebuah teknologi pengelolaan laporan barang milik daerah melalui aplikasi yang diberi nama SI-DINA (sistem data informasi aset). Tujuan dari dibuatnya inovasi ini adalah agar Terwujudnya efektifitas pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu dan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi ini dalam Pelaporan dan Penyusunan Asetnya.	
4	Pelayanan Pajak Daerah dengan Proses Covid-19	Kondisi Pelayanan Pajak Daerah dengan Proses Kesehatan Covid-19 diperkuat dengan Perbup Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kab. Inhu. Berdasarkan hal tersebut, maka disusun pelayanan pajak daerah dengan Protokol Kesehatan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dalam rangka pelaksanaan tatanan hidup normal baru, produktif, aman dari penyebaran luasan pandemi Covid-19. Adapun tahapan inovasi pelayanan pajak daerah dengan Proses Covid-19 melalui beberapa tahap yaitu: 1. Tahap Inovasi Inovasi dilakukan pada saat pandemi Covid-19 mulai merembak dan dirasakan oleh semua sektor terutama yang bergerak di bidang Pelayanan Publik (Maret 2020 - April 2020). Perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan Protokol Kesehatan yaitu dengan mewajibkan setiap petugas dan Wajib Pajak Memakai Masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak serta menyediakan hand sanitizer, Wastafel juga membersihkan ruangan dengan desinfektan. 2. Tahap Uji Coba Dilakukan dengan mengikuti Protokol Kesehatan dan memberikan informasi kepada setiap petugas pelayanan dan wajib pajak yang datang dalam rangka pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak daerah (Mei 2020). 3. Tahap Penerapan Penerapan Protokol Kesehatan sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah disusun.	
5	Sistem elektronik pajak daerah (seroja)	Pelayanan Pajak Daerah dengan Aplikasi Sistem Elektronik Pajak Daerah (SEROJA) diperkuat dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah (SEROJA). Berdasarkan hal tersebut, maka disusun pelayanan pajak daerah dengan Sistem Elektronik Pajak Daerah (SEROJA) sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah. Tujuan inovasi pelayanan pajak daerah dengan Aplikasi SEROJA. 1. Melaksanakan pelayanan pajak daerah dengan Aplikasi SEROJA. 2. Membiasakan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi dalam layanan pajak daerah menuju era digitalisasi. 3. Memberikan informasi dan edukasi pada wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah dengan menggunakan Aplikasi SEROJA. 4. Membantu wajib pajak dalam melaksanakan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak daerah. 5. Memastikan setiap wajib pajak yang melakukan pelayanan pajak daerah dengan menggunakan Aplikasi SEROJA.	

6	Sistem Informasi Rilis Berita Pembangunan Daerah	Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Inhu telah membangun aplikasi Rilis Berita. Dalam mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah diharapkan peran dan partisipasi yang maksimal dalam memanfaatkan penggunaan aplikasi RilisBerita oleh humas pemerintah di OPD, BUMN,BUMD dan Instansi Vertikal. Tujuan inovasi ini yaitu menyebarluaskan kepada publik konten dan atau rilis berita serta data pendukung lainnya terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan serta citra positif pemerintah daerah melalui media milik perangkat daerah masing-masing. Manfaat inovasi ini yaitu masyarakat dapat mengetahui info terkait pemerintahan secara terbuka melalui aplikasi atau web rilis berita dan menyampaikan setiap kebijakan dan program kegiatan pemerintah kepada publik secara cepat, tepat dan dapat menimbulkan respon yang positif di masyarakat.	
7	Pengembangan Pekarangan Lestari (P2L)	Kegiatan P2L dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganannya lokasi prioritas intervensi penurunan stunting. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kegiatan P2L merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya tanaman sayuran melalui kegiatan sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen. Kegiatan P2L dapat dilakukan pada lahan tidur dan/atau lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah, dan lainnya. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), pemanfaatan sumber daya local (local wisdom), pemberdayaan masyarakat (community engagement) dan berorientasi pasar (go to market). Tujuan inovasi ini yaitu Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.Manfaat inovasi ini yaitu Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan serta peningkatan pendapatan rumah tangga kelompok penerima manfaat.	
8	Diversifikasi Pangan Lokal (Dipangkal)	Untuk mendorong agar diversifikasi konsumsi pangan dapat berjalan maka, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif. Tujuan kegiatan Alih Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal Tahun Anggaran 2019 adalah : a. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan peserta dibidang Diversifikasi Olahan Pangan Lokal b. Membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan pokok non beras dan terigu. Manfaat dari Alih Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal adalah: a. Bertambahnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengolah pangan lokal b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih mengonsumsi pangan pokok yang beragam selain beras dan terigu.	
9	Edukasi Keamanan Pangan Melalui Leaflet (Si Kepang Lea)	Edukasi Keamanan Pangan Melalui Leaflet (Si Kepang Lea) merupakan salah satu inovasi dalam kategori sosialisasi/edukasi ke masyarakat dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan Inovasi ini yaitu Mengedukasi masyarakat tentang Keamanan Pangan melalui leaflet. Media leaflet karena disesain dengan baik akan membuat masyarakat lebih tertarik dan mudah memahami isi dari leaflet tersebut. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang Keamanan Pangan menjadi lebih paham akan pangan yang aman untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.Menciptakan dan meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam program keamanan pangan untuk meningkatkan edukasi budaya pangan aman;Meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dan masyarakat untuk menerapkan peraturan/standar mutu dan keamanan pangan. Manfaat inovasi ini yaitu Dengan menggunakan media leaflet, masyarakat menjadi teredukasi tentang keamanan pangan yang sehat dan halal;Berbagai pihak mulai berperan dalam meningkatkan edukasi budaya pangan aman;	
10	Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Pada P2TP2A Kab. Inhu Di Kecamatan Se Kab.Inhu	Banyak terjadinya bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingadiperlukan Penanganan Kasus yang cepat, Tepat, Tanggap dan Optimal yang pada akhirnya memberikan Pelayanankepada masyarakat khususnya kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri hulu Nomor: kpts. 391/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diseluruh kecamatan sel kabupaten Indragiri Hulu, mempunyai tugas sebagai berikut: 1. memfasilitasi pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kecamatanmasing-masing 2.memfasilitasi pemulihan dan Reintegrasi terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak dikecamatanmasing-masing. 3.memberikan penguatan rohani, dan pemulihan trauma healing terhadap korban kekerasan perempuan dan anak 4.memfasilitasi tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan penanganan kasuskorban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) Kabupaten Indragiri Hulu. tujuan inovasi sebagai berikut: 1. mempercepat pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditanganioleh tim P2TP2A Kab.Inhu 2.memberikan pelayanan prima terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.	
11	PTSP C-19 Kab. Indragiri Hulu	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DENGAN PROTOKOL COVID-19 Kondisi darurat Covid-19 yang diperkuat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Covid-19, mendorong semua sektor terutama pelayanan publik untuk dapat menyesuaikan kegiatan dengan protokol kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka di susun Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Protokol Covid-19 dan Pelayanan daring sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dalam rangka pelaksanaan tatatan hidup normal baru, produktif dan aman Covid-19. Tujuan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Protokol Covid-19 Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Protokol Covid-19 Membiasakan budaya hidup bersih dan sehat menuju tatatan hidup normal baru yang aman Covid-19 Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Protokol Covid-19 Membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan protokol Covid-19; Memastikan setiap masyarakat dan pelaku usaha yang mengurus perizinan untuk mengikuti protokol Covid-19. Memastikan setiap masyarakat dan pelaku usaha yang mengurus perizinan untuk mengikuti protokol Covid-19.	
12	Pelayanan perizinan daring	Pelayanan Perizinan daring merupakan alternatif bagi pemohon yang tidak dapat langsung datang ke DPMPSTSP untuk melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan akan semakin mempermudah, mempercepat, serta mempersingkat rantai perizinan sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Pelayanan Perizinan daring yang di berikan DPMPSTSP Kabupaten Indragiri Hulu berupa aplikasi sistem informasi, email dan media sosial yang dapat diakses langsung oleh pemohon tanpa harus datang ke kantor DPMPSTSP. Tujuan inovasi daerah Pelayanan Perizinan Daring yaitu Mengendok proses pengurusan perizinan yang harus hadir ke kantor DPMPSTSP, mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan, mempermudah akses bagi pemohon yang melakukan pengurusan perizinan, membantu program pemerintah dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, meningkatkan jumlah Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan.	
13	Surat Hak Penempatan (SHP) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP)	Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat (SHP) adalah Surat Hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko atau kios dan los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat (KTPP) adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktivitas dan menggunakan Pasar Tertentu sebagai tempat melakukan badan usaha. Pelaku Usaha Perseorangan yang memiliki KTPP dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas disebut Pedagang TetapPelaksanaan Pendataan dan Penertiban Surat Hak Penempatan (SHP) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP) mengacu kepada amanat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016, dimana dalam peraturan tersebut, Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, dimana setiap orang atau badan usaha yang menggunakan kios, los wajib memiliki Surat Hak. Tahapan Pelaksanaan Meliputi :Menyiapkan aturan yang melandasi kegiatan dan pembentukan Tim. Sosialisasi terhadap Pedagang dilingkungan Pasar Rakyat Kota Rengat dan Pasar Rakyat Soegih BellasMelakukan Pendataan Terhadap Pedagang di Dua Pasar harian tersebut untuk mendapatkan jumlah dan kondisi Rili pedagang dilapanganMenyiapkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Mengirimkan surat undangan kepada pedagang untuk pembuatan Surat Hak Penempatan (SHP) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP)Opname kelengkapan untuk penyesuaian data dengan kondisi Rili dilapanganProses Penerbitan Surat Hak Penempatan (SHP) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP)Penyerahan Surat Hak Penempatan (SHP) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP) kepada pedagang. Tujuan inovasi ini yaitu Memberi kepastian hukum terhadap hak pedagang Pasar Rakyat terhadap pemanfaatan sarana milik Pemerintah (Pasar).	
14	Inhu Terang bersama Penerangan Jalan umum (PJU) Mandiri	Penerangan Jalan Umum, yang selanjutnya disingkat PJU , adalah penggunaan tenaga listrik secara Khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum nasional,provinsi dan kota/kabupaten serta penghubung antar kelurahan / Desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, mengisi lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaannya dilakukan oleh pemerintah Desa yang biaya rekeningnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan umum bagi desa desa di seluruh Kabupaten Indragiri Hulu yang belum terjangkau karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, dengan adanya inovasi ini desa menjadi terang benderang, kamtibmas menjadi lebih terjaga, perekonomian Desa akan tumbuh.	
15	Peningkatan Sistem Informasi Pelayan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT I Information And Tecnology)	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT. Pengujian Kendaraan Bermotor Di kabupaten Indragiri Hulu sudah berbasis IT dan ditunjang dengan SDM yang berpendidikan di bidang yang menangani IT, dan didukung oleh beberapa Orang Penguji yang sudah mengikuti jenjang pendidikan Pengujian Kendaraan Bermotor yang siap melayani masyarakat dalam menguji kendaraannya secara Online melalui Aplikasi yang berbasis IT. Dan dalam memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan secara mudah dan cepat dengan sistem pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC dan Scan Qris, dengan secara kemudahan yang diberikan dapat membantu pemilik kendaraan umum maupun angkutan barang dalam proses pengujian kendaraan bermotor serta proses administrasinya. Adapun Standar dalam memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang berbasis IT , yaitu : Produk Pelayanan Persyaratan Pelayanan Sistem Mekanisme dan Prosedur Jangka Waktu Penyelesaian Biaya Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Memiliki Beberapa alat Uji yang sudah Sesuai dengan standar Kementerian Perhubungan Darat dan memiliki alat yang akurat dan terintegrasi langsung ke Kementerian Perhubungan darat. dalam Pelayanan Uji Laik Jalan secara Online (Secara Robotik) dan Digital. Tujuan inovasi ini yaitu memberikan Pelayanan umum Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Mudah dan cepat kepada masyarakat Memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Memakai alat uji yang secara komputerisasi yang terintegrasi dengan kementerian Perhubungan Transportasi Darat Memudahkan Pemilik Kendaraan dalam sistem Pembayaran secara non tunai Menghasilkan uji Kendaraan secara akurat dan transparan Mendapat hasil uji kendaraan yang laik jalan Menjaga Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan agar tidak cepat rusak Mengurangi Resiko Kecelakaan dan Ramah Lingkungan.	

16	Inovasi Budidaya Bawang Merah Indragiri Hulu Melalui Metode Perbanyakan Umbi	Inovasi Budidaya Bawang Merah Indragiri Hulu Melalui Metode Perbanyakan Umbi" Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi dalam pengembangan budidaya tanaman bawang merah jika dilihat dari aspek topografi, suhu dan iklim , geografis dan jenis tanah budidaya bawang merah tergolong pada tanaman hortikultura yang resisten terhadap serangan hama dan penyakit tetapi sangat rentan terhadap perubahan cuaca. terlebih pada saat ini pemerintah sedang menggalakkan kembalipencanangan pembangunan kawasan lumpung pangan (food estate) sesuai dengan dasar hukum PP No. 18 Tahun 2010 tentang usaha Budidaya Tanaman dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan nasional. namun tujuan dan cita- cita pembangunan lumpung pangan berbasis budaya bawang merah tersebut tidak akan berjalan jika kenyataan kondisi real dilapangan para pelaku utama pertanian masih disibukkan permasalahan keterbatasan bibit/benih unggul bawang merah terutama benih yang rentan terhadap perubahan cuaca dan temperatur wilayah. komoditi bawang merah Inhu ini juga diproyeksikan menjadi komoditi unggulan perioritas Indragiri Hulu yang memiliki nilai jual tinggi serta sebagai alternatif pilihan tanaman hortikultura bagi masyarakat Indragiri Hulu dalam memperbaiki taraf hidup rumah tangga dan meningkatkan nilai tukar usaha pertanian pelaku utama pertanian. Namun problematika yang sering dihadapi oleh pelaku utama pertanian kita ialah terkendalanya produksi bawang merah akibat keterbatasan benih bawang merah (Salah satu faktor varietas benih bawang merah jawa tidak bisa ditanam di wilayah Inhu akibat faktor cuaca dan temperatur Wilayah) Melalui rangka pemikiran ini , ditawarkan sebuah inovasi pengembangan budidaya bawang merah melalui metode perbanyakan secara umbi dengan oput menghasilkan benih tanaman bawang merah yang memiliki sipat unggul dan spesipik lokasi yang bisa untuk di kembangkan di kabupaten indragiri Hulu . Tujuan inovasi ini yaitu untuk menghasilkan benih tanaman bawang merah yang memiliki sifat unggul dan spesifik lokal.	
2022			
1	Pisp C-19 Kab. Indragiri Hulu	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DENGAN PROTOKOL COVID-19 Kondisi darurat Covid-19 yang diperkuat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Covid-19, mendorong semua sektor terutama pelayanan publik untuk dapat menyesuaikan kegiatan dengan protokol kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka di susun Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Protokol Covid-19 dan Pelayanan daring sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dalam rangka pelaksanaan tatanan hidup normal baru, produktif dan aman Covid-19. Tujuan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Protokol Covid-19 Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Protokol Covid-19 Membiasakan budaya hidup bersih dan sehat menuju tatanan hidup normal baru yang aman Covid-19 Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Protokol Covid-19 Membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan protokol Covid-19; Memastikan setiap masyarakat dan pelaku usaha yang mengurus perizinan untuk mengikuti protokol Covid-19.	
2	Pelayanan Perizinan Daring	Pelayanan Perizinan daring merupakan alternatif bagi pemohon yang tidak dapat langsung datang ke DPMPSTSP untuk melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan akan semakin mempermudah, mempercepat, serta mempersingkat rantai perizinan sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Pelayanan Perizinan daring yang di berikan DPMPSTSP Kabupaten Indragiri Hulu berupa aplikasi sistem informasi, email dan media sosial yang dapat diakses langsung oleh pemohon tanpa harus datang ke kantor DPMPSTSP. Tujuan inovasi daerah Pelayanan Perizinan Daring yaitu Memperpendek proses pengurusan izin sehingga pemohon tidak perlu harus hadir ke kantor DPMPSTSP, mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan, mempermudah akses bagi pemohon yang melakukan pengurusan perizinan, membantu program pemerintah dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, meningkatkan jumlah Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan.	
3	Gerai Pangan Murah	Kebijakan yang terkait upaya stabilisasi komoditi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. UU No. 8 Menyatakan bahwa Pemerintah Berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan distribusi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. sedangkan UU No. 7 menyatakan pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Kondisi ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Tujuan inovasi ini yaitu Penyediaan dan penyaluran bahan pangan pokok untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Manfaat inovasi ini yaitu 1.Memudahkan akses pangan pokok bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. 2.Harga pangan pokok yang wajar dan terjangkau 3. Bahan pangan pokok yang aman, sehat, utuh dan halal. 4.Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok menjelang hari besar keagamaan dan nasional (HBKN).	
4	Pelayanan Pajak Daerah Dengan Prokes Covid-19	Kondisi Pelayanan Pajak Daerah dengan Prokes Kesehatan Covid-19 diperkuat dengan Perbup Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kab. Inhu. Berdasarkan hal Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kab. Inhu. Berdasarkan hal tersebut, maka disusun pelayanan pajak daerah dengan Protokol Kesehatan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dalam rangka pelaksanaan tatanan hidup normal baru, produktif, aman dari penyebaran luasan pandemi Covid-19. Adapun tahapan inovasi pelayanan pajak daerah dengan Prokes Covid-19 melalui beberapa tahap yaitu: 1.Tahap Inovasi Inovasi dilakukan pada saat pandemi Covid-19 mulai merebak dan dirasakan oleh semua sektor terutama yang bergerak di bidang Pelayanan Publik (Maret 2020 - April 2020). Perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan Protokol Kesehatan yaitu dengan mewajibkan setiap petugas dan Wajib Pajak Memakai Masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak serta menyediakan hand sanitaizer, Wastafel juga membersihkan ruangan dengan desinfektan. 2. Tahap Uji Coba Dilakukan dengan mengikuti Protokol Kesehatan dan memberikan informasi kepada setiap petugas pelayanan dan wajib pajak yang datang dalam rangka pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak daerah (Mei 2020). 3.Tahap Penerapan Penerapan Protokol Kesehatan sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah disusun (Juni 2020).	
5	Tuah Ikm	Kegiatan TUAH IKM diawali dengan mengaktifkan kembali gedung promosi yang ada di Kota Rengat dan sekaligus dijadikan pusat penjualan oleh-oleh khas Indragiri Hulu dan Cafe IKM.Tujuan inovasi ini yaitu Untuk mencari langkah-langkah produktif melalui kegiatan yang inovatif dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang solutif sehingga dapat mengatur strategi dalam menata usaha para pelaku IKM hingga mendapatkan peningkatan hasil dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dengan adanya program dari TUAH IKM maka pelaku IKM mendapat kesempatan untuk mempromosikan produknya dan meningkatkan penjualan produk, serta mendapatkan kesempatan untuk difasilitasi dengan lembaga/organisasi terkait. Program TUAH IKM telah memberikan kesempatan untuk mempromosikan jenis produk-produk kepada pelaku IKM yang sebelumnya belum mendapatkan pemasaran yang luas serta membantu Pelaku IKM mengembangkan produknya baik dari segi kemasan produk dsb agar memiliki potensi yang lebih baik dan layak untuk dipasarkan ke masyarakat luas.	
6	Sistim Informasi Jabatan Provinsi Riau (SI-JABPRI)	Untuk mendukung Pelaksanaan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku maka dirancang suatu Aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), serta Evaluasi Jabatan (EJVAB) dengan cepat, tepat, dilengkapi dengan petunjuk penyusunan yang benar yaitu: SISTEM INFORMASI JABATAN PROVINSI RIAU (SI-JABPRI). Aplikasi ini merupakan Replikasi SI-JABPRI dari Pemerintah Provinsi Riau yang juga diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Aplikasi ini dibangun berbasis website sehingga dapat diakses kapanpun dan dari manapun oleh setiap pengguna di masing-masing OPD. Selain itu setiap masing-masing OPD memiliki Username dan Password agar dapat menambahkan / mengubah Informasi sehingga data-data OPD terus Up To Date.Data Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang di input dapat diunduh dalam berbagai jenis berkas seperti Word, Excel atau PDF dan format hasil unduhan dibuat sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Data Analisis yang sudah di Input, sangat mudah dievaluasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan menjadi Big Data Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Manajemen Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Indragiri Hulu.	
7	Ekir Inhu	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dikabupaten Indragiri Hulu sudah berbasis IT dan ditunjang dengan SDM yang berpendidikan di bidang yang menangan IT, dan didukung oleh beberapa Orang Penguji yang sudah mengikuti jenjang pendidikan Pengujian Kendaraan Bermotor yang siap melayani masyarakat dalam menguji kendaraannya secara Online melalui Aplikasi yang berbasis IT. Dan dalam memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan secara mudah dan cepat dengan sistem pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC dan Scan Qris, dengan secara kemudahan yang diberikan dapat membantu pemilik kendaraan umum maupun angkutan barang dalam proses pengujian kendaraan bermotor serta proses administrasinya. Adapun Standar dalam memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang berbasis IT , yaitu : Produk Pelayanan PERSYARATAN Pelayanan Sistem Mekanisme dan Prosedur Jangka Waktu Penyelesaian Biaya Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Memiliki Beberapa alat Uj yang sudah Sesuai dengan standar Kementerian Perhubungan Darat dan memiliki alat yang akurat dan terintegrasi langsung ke Kementerian Perhubungan darat. dalam Pelayanan Uji Laik Jalan secara Online (Secara Robotik) dan Digital. Tujuan inovasi ini yaitu memberikan Pelayanan umum Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Mudah dan cepat kepada masyarakat Memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Memakai alat uj yang secara komputerisasi yang terintegrasi dengan kementerian Perhubungan Transportasi Darat Memudahkan Pemilik Kendaraan dalam sistem Pembayaran secara non tunai Menghasilkan uji Kendaraan secara akurat dan transparan Mendapat hasil uji kendaraan yang laik jalan Menjaga Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan agar tidak cepat rusak Mengurangi Resiko Kecelakaan dan Ramah Lingkungan	
8	Satgas Covid 19 Satpol Pp Kab.Inhu	Sesuai dengan Pasal 5 huruf b Jo Pasal II huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa tugas dan fungsi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penyelenggaraan Ketertibn Umum dan Ketentraman Masyarakat yang salah satunya meliputi kegiatan Patroli. Bahwa sesuai dengan SK Bupati Nomor Kpts. 184/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Indragiri Hulu Satuan Polisi Pamong Praja diberikan tugas tambahan untuk melakukan Pencegahan dan penindakan terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga mekanisme patroli yang Satpol-PP lakukan dibedakan antara Patroli Tranitum dan Patroli Penanganan Covid-19. Tujuan Inovasi ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yaitu: 1. Memakai masker 2. Mencuci tangan 3. Menghindari Kerumunan 4. Mengatur Jarak 5. Menghindari untuk mobilisasi (berpergian) Manfaat inovasi ini yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.	
9	Kam Vid 19 Kpbd	-	
10	Apar	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 2 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 T ahu 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pengadaan Pemadam Kebakaran. Menunjuk Tim Pemeriksa dan Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada kantor penanggulangan bencana daerah kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati Indragiri Hulu, Pemeriksa Alat Pemadam Api Ringan(APAR) sebagaimana dimaksud Dikurt kesatu memiliki tugas sebagai berikut ; <input type="checkbox"/> Mensosialisasikan peraturan terkait Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (AP AR) <input type="checkbox"/> Menghitung jumlah alat Pemadam Api Ringan(AP AR) yang layak fungsi dan yang tidak layak fungsi Melakukan <input type="checkbox"/> pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan(AP AR) <input type="checkbox"/> Membuat surat layak pakai Hasil inovasi yang di dapat ; Menambah Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (P AD) <input type="checkbox"/> Kegiatan ini juga mendukung SPM (Standar Pelayanan Minimal)Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Indragiri Hulu Susai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 T ahu 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPA TENKOTA yaitu jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana <input type="checkbox"/> mendukung kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat dan dunia usaha	

11	Si-Atan Beda	Dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Penanganan Bencana Daerah yang cepat dan Responsif terhadap aduan masyarakat pada Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021, Maka Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu membuat suatu Inovasi yaitu suatu media yang di sebut Aplikasi Web untuk memudahkan akses terhadap aduan masyarakat mengenai suatu bencana yang terjadi di daerahnya. Aplikasi Web yang di diciptakan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Indragiri Hulu yaitu SI-ATAN BEDA dan dapat di akses melalui Link si-atan. inuhkab.go.id. Ketika Aplikasi Web tersebut di Ujicoba dan diterapkan di masyarakat mendapat respon yang sangat bagus dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.	
12	Si-Dilan : Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Dalam melaksanakan tugas verifikasi Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dilakukan secara berkala untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan memperkecil resiko kesalahan dalam penggunaan anggaran, Penyusunan dan Penyampian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen. Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan /Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sesuai dengan Regulasi diatas Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum berjalan secara Optimal hal ini disebabkan belum adanya media Pengelola Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dapat mengearipikan LPJ secara Digital, selain itu penyusunan proses verifikasi Laporan Pertanggungjawaban masih dilakukan secara Manual. Dalam rangka pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Penatausahaan keuangan pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah terobosan inovasi yang menjadi rencana Aksi Perubahan yaitu Optimalisasi Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara melalui Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI-DILAN) selanjutnya diharapkan penggunaan aplikasi dapat mengatasi permasalahan terhadap pengelolan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.	
13	Aplikasi M-PPKAD	Tujuan dari Aplikasi m-PPKAD adalah untuk Perluasan Jangkauan Layanan Konsultasi, Pembinaan dan Pengaduan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu secara Online. Ada 2 (dua) manfaat yang diperoleh dalam Penerapan Aplikasi m-PPKAD ini, yaitu: 1. Manfaat internal, antara lain: a. Tersedianya aplikasi baru, adanya dasar hukum berupa peraturan bupati dan SOP dalam memberikan layanan konsultasi, pembinaan dan pengaduan kepada stakeholders; b.Terlaksananya fungsi kontrol terhadap pelayanan yang diberikan; 2.Manfaat eksternal, antara lain: a.Tersedianya akses informasi yang lebih cepat dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun; b.Memperoleh pelayanan yang optimal.	
14	Garpu Cantik	Program pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri di wilayah Puskesmas Kulim Jaya, selama ini pendistribusiannya dilaksanakan oleh petugas Puskesmas secara langsung ke sekolah sekolah SMP dan SMA yang ada diwilayah kerjanya, dimana tablet tambah darah diberikan secara langsung oleh petugas serta langsung diminum ditempat oleh remaja putri. Namun hal tersebut diatas hanya dapat dilaksanakan sampai saat sebelum Pandemi covid-19 pada awal tahun 2020. Untuk selanjutnya kegiatan tersebut sempat terhenti dengan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran secara Daring untuk anak sekolah. Hal ini menyebabkan program pemberian tablet tambah ke sekolah terkendala. Oleh karena itu UPTD Puskesmas Kulim Jaya melaksanakan program inovasi dalam pendistribusian tablet tambah darah untuk Remaja Putri dan melibatkan mereka dalam kegiatannya, dengan nama Gerakan Remaja Putri Cegah Stunting Dengan Tablet Besi Ku (GARPU CANTIK).	
15	Sistem Informasi Rumah Sakit (Simrs)	Semua unit terkait implementasi optimalisasi penguasaan modul aplikasi SIMRS akan dilakukan secara digital terkomputerisasi terhubung pada satu server aplikasi SIMRS,hingga diharapkan tercapainya keakuratan data, optimalisasi dan penghematan Sumber daya waktu, tenaga dan SDM. Tujuan Umum Implementasi aplikasi SLMRS dalam rangka optimalisasi penggunaan modul modul aplikasi SIMRS pada RSUD Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tujuan Khusus Optimalisasi penggunaan aplikasi SIMRS (Software) dengan cara pengadaan perlengkapan perangkat keras (Hardware), pelatihan SOM operator SIMRS(Brainware).	
16	Website Selais (Seputar Layanan Informasi Sosial)	Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan Official Website sebagai sarana komunikasi dan informasi, pengelolaan website di lakukan oleh staf Dinas Sosial yang aktif memberikan informasi seperti berita kegiatan internal dan kegiatan eksternal, kebijakan lembaga dan informasi lengkap tentang Dinas Dinas Sosial, informasi tentang Informasi tentang Pelayanan, ini bertujuan untuk memberikaninformasi secepat dan sebaik mungkin agar kegiatan informasi dan komunikasi tetap aktif. Konten website setiap tahun nya selalu memberikan inovasi dan pengembangan barunya, untuk tahun ini website Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu memiliki pembaharuan informasi yang tersedia di website yakni Penyediaan QR Code Jenis Pelayanan yang nantinya langsung tertuju ke Website Dinas Sosial, adanya penambahan link terkait di artikel, link langsung ke berbagai media seperti instagram dan facebook) dengan menampilkan media sosial tersebut.	
17	Klinik Bunda	Klinik BUNDA singkatan dari KLINIK BUMdesa iNhu berDAya. Pada tahun 2021 dari 178 BUM Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu 172 BUM Desa atau 96,62% masuk dalam klasifikasi kinerja BUM Desa Perintis dan Pemula. Klasifikasi kinerja BUM Desa perintis dan pemula ini sesuai dengan Permendesa PDDT Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah kategori dimana BUM Desa semenjak berdiri belum mampu melaksanakan manajemen pengelolaan yang tepat, kelayakan usaha belum optimal, kelembagaan yang belum efektif, administrasi, pelaporan dan pertanggung jawaban belum akuntabel dan terakhir belum memberikan dampak bagi pengakselerasian usaha ekonomi lokal desa. BUM Desa sebagai salah satu kelembagaan Ekonomi yang ada di perdesaan selah terbitnya Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana setelah dibentuk belum terkloka dengan baik dengan pemerataan data yang ada. Hal ini juga merupakan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu OPD yang mampu pemberdayaan masyarakat dan Desa menjadi leading sektor dari semua program dan kegiatan. Pembentukan Klinik BUM Desa ini diharapkan menjadi suatu wadah pembinaan dan pendampingan yang akan memudahkan koordinasi dan dukungan dari stakeholder untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan BUM Desa. Dukungan yang diberikan dapat berupa kebijakan anggaran, pendampingan teknis (technical Asistance), serta permodalan yang dibutuhkan oleh BUM Desa. Diharapkan dengan adanya layanan Klinik BUM Desa dapat bermanfaat sebagai media sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta pada akhirnya dapat memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen badan usaha milik desa.	
18	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Jemput Bola Lewat Hp (Si Jempol Leha)	Pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan terkait dengan dan latar belakang mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penyediaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, dalam pengalaman yang telah dilakukan di Kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan rengat kabupaten indragiri hulu saat ini masih terdapat permasalahan mengenai sebuah kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan. Masalah yang ditemui saat masyarakat ini melakukan kepengurusan administrasi sebanyak masyarakat yang belum paham persyaratan apa saja yang harus di bawa , ada juga sebuah masalah di kecamatan rengat sepeerti lambatnya pelayanan administrasi dikacamatan, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) terjadinya penumpukan berkas/dokumen, surat-menyurat, kurang nya informasi kepada masyarakat dan kurangnya sarana prasarana yang belum memadai menyebabkan pelayanan lebih lama dari waktu yang ditentukan sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengurus administrasi kependudukan. manfaat bagi kecamatan terwujudnya sistem pelayanan administrasi kependudukan masyarakat dengan teknologi HP dapat dengan mudah menginformasikan persyaratan- persyaratan administrasi kependudukan dengan mudah cepat dan efisien. manfaat bagi pemerintah mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan data kependudukan sangat penting bagi penyusunan perencanaan pembangunan kedepannya, sehingga perencanaan dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Bagi masyarakat cepatnya pelayanan administrasi kependudukan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dalam penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama penduduk dapat mengakses program dari pemerintah, seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.	
19	Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Kegiatan P2L dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kegiatan P2L merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya tanaman sayuran melalui kegiatan sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen. Kegiatan P2L dapat dilakukan pada lahan tidur dan/atau lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah, dan lainnya. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), pemanfaatan sumber daya local (local wisdom), pemberdayaan masyarakat (community engagement) dan berorientasi pasar (go to market). Tujuan inovasi ini yaitu Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.Manfaat inovasi ini yaitu Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan serta peningkatan pendapatan rumah tangga kelompok penerima manfaat.	
2023			
1	Ekir – Inhu	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT. Pengujian Kendaraan Bermotor Di kabupaten Indragiri Hulu sudah berbasis IT dan ditunjang dengan SDM yang berpendidikan di bidang yang menangani IT, dan didukung oleh beberapa Orang Penguji yang sudah mengikuti jenjang pendidikan Pengujian Kendaraan Bermotor yang siap melayani masyarakat dalam menguji kendaraannya secara Online melalui Aplikasi yang berbasis IT. Dan dalam memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan secara mudah dan cepat dengan sistem pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC dan Scan Qris, dengan secara kemudahan yang diberikan dapat membantu pemilik kendaraan umum maupun angkutan barang dalam proses pengujian kendaraan bermotor serta proses administrasinya. Adapun Standar dalam memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang berbasis IT , yaitu : Produk Pelayanan Persyaratan Pelayanan Sistem Mekanisme dan Prosedur Jangka Waktu Penyelesaian Biaya Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Memiliki Beberapa alat Uji yang sudah Sesuai dengan standar Kementerian Perhubungan Darat dan memiliki alat yang akurat dan terintegrasi langsung ke Kementerian Perhubungan darat. dalam Pelayanan Uji Laki, jalan secara Online (Secara Robotik) dan Digital. Tujuan inovasi ini yaitu memberikan Pelayanan umum Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Mudah dan cepat kepada masyarakat Memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Memakai alat uji yang secara komputerisasi yang terintegrasi dengan kementerian Perhubungan Transportasi Darat Memudahkan Pemilik Kendaraan dalam sistem Pembayaran secara non tunai Menghasilkan uji Kendaraan secara akurat dan transparan Mendapat hasil uji kendaraan yang baik jalan Menjaga Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan agar tidak cepat rusak Mengurangi Resiko Kecelakaan dan Ramah Lingkungan.	
2	Sistim Informasi Jabatan Provinsi Riau (Si-Jabpri)	Untuk mendukung Pelaksanaan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku maka dirancang suatu Aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), serta Evaluasi Jabatan (EVJAB) dengan cepat, tepat, dilengkapi dengan petunjuk penyusunan yang benar yaitu: SISTEM INFORMASI JABATAN PROVINSI RIAU (SI-JABPRI). Aplikasi ini merupakan Replikasi SI-JABPRI dari Pemerintah Provinsi Riau yang juga diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Aplikasi ini dibangun berbasis website sehingga dapat diakses kapanpun dan dari manapun oleh setiap pengguna di masing-masing OPD. Selain itu setiap masing-masing OPD memiliki Username dan Password agar dapat menambahkan / mengubah Informasi sehingga data-data OPD terus Up To Date. Data Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang di input dapat diunduh dalam berbagai jenis berkas seperti Word, Excel atau PDF dan format hasil unduhan dibuat sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Data Analisis yang sudah di Input, sangat mudah dievaluasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan menjadi Big Data Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Manajemen Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Indragiri Hulu.	

3	Si-Atan Beda	Dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Penanganan Bencana Daerah yang cepat dan Responsif terhadap aduan masyarakat pada Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021, Maka Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu membuat suatu inovasi yaitu suatu media yang di sebut Aplikasi Web untuk memudahkan akses terhadap aduan masyarakat mengenai suatu bencana yang terjadi di daerahnya. Aplikasi Web yang di ciptakan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Indragiri Hulu yaitu SI-ATAN BEDA dan dapat di akses melalui Link si-atan. inhu.kab.go.id. Ketika Aplikasi Web tersebut di Ujicoba dan diterapkan di masyarakat mendapat respon yang sangat bagus dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.	
4	Si-Dilan	Dalam melaksanakan tugas verifikasi Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dilakukan secara berkala untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan memperkecil resiko kesalahan dalam penggunaan anggaran, Penyusunan dan Penyajian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen. Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sesuai dengan Regulasi diatas Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum berjalan secara Optimal hal ini disebabkan belum adanya media Pengelola Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dapat mengarsipkan LPJ secara Digital, selain itu penyusunan proses verifikasi Laporan Pertanggungjawaban masih dilakukan secara Manual. Dalam rangka pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Penatausahaan keuangan pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah terobosan inovasi yang menjadi rencana Aksi Perubahan yaitu Optimalisasi Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara melalui Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI-DILAN) selanjutnya diharapkan penggunaan aplikasi dapat mengatasi permasalahan terhadap pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.	
5	Aplikasi M-PPKAD	Tujuan dari Aplikasi m-PPKAD adalah untuk Perluasan Jangkauan Layanan Konsultasi, Pembinaan dan Pengaduan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu secara Online. Ada 2 (dua) manfaat yang diperoleh dalam Penerapan Aplikasi m-PPKAD ini, yaitu: 1. Manfaat internal, antara lain: a. Tersedianya aplikasi baru, adanya dasar hukum berupa peraturan bupati dan SOP dalam memberikan layanan konsultasi, pembinaan dan pengaduan kepada stakeholders; b.Terlaksananya fungsi kontrol terhadap pelayanan yang diberikan; 2.Manfaat eksternal, antara lain: a.Tersedianya akses informasi yang lebih cepat dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun; b.Memperoleh pelayanan yang optimal.	
6	Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)	Tujuan inovasi ini yaitu guna mempermudah dan mempercepat pelayanan Masyarakat dalam Kepengurusan Administrasi Kependudukan yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan ditindak lanjuti ke Kantor Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hulu. Manfaatnya yaitu Masyarakat akan cepat dan mudah dalam kepengurusan administrasi sesuai dengan Persyaratan yang ada. terutama dalam kepengurusan administrasi Kependudukan yang akan ditindaklanjuti ke Disduk Capil Kabupaten	
7	Website Selais (Seputar Layanan Informasi Sosial)	Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan Official Website sebagai sarana komunikasi dan informasi, pengelolaan website di lakukan oleh staf Dinas Sosial yang aktif memberikan informasi seperti berita kegiatan internal dan kegiatan eksternal, kebijakan lembaga dan informasi lengkap tentang Dinas Dinas Sosial, informasi tentang Informasi tentang Pelayanan, ini bertujuan untuk memberikan informasi secepat dan sebaik mungkin agar kegiatan informasi dan komunikasi tetap aktif. Konten website setiap tahun nya selalu memberikan inovasi dan pengembangan barunya, untuk tahun ini website Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu memiliki pembaharuan informasi yang tersedia di website yakni Penyediaan QR Code Jenis Pelayanan yang nantinya langsung tertuju ke Website Dinas Sosial, adanya penambahan link terkait di artikel, link langsung ke berbagai media seperti instagram dan facebook) dengan menampilkan media sosial tersebut.	
8	Klinik Bunda	Klinik BUNDA singkatan dari KLINIK BUMdesa INhu berDaya. Pada tahun 2021 dari 178 BUM Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu 172 BUM Desa atau 96,62% masuk dalam klasifikasi kinerja BUM Desa Perintis dan Pemula. Klasifikasi kinerja BUM Desa perintis dan pemula ini sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah kategori dimana BUM Desa semenjak berdiri belum mampu melaksanakan manajemen pengelolaan yang tepat, kelayakan usaha belum optimal, kelembagaan yang belum efektif, administrasi, pelaporan dan pertanggung jawaban belum akuntabel dan terakhir belum memberikan dampak bagi pengkakselerasian usaha ekonomi lokal desa. BUM Desa sebagai salah satu kelembagaan Ekonomi yang ada di perdesaan setelah terbitnya Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana setelah dibentuk belum terlakoela dengan baik dengan pencermatan data yang ada. Hal ini juga merupakan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu OPD yang mampu pemberdayaan masyarakat dan Desa menjadi leading sektor dari semua program dan kegiatan. Pembentukan Klinik BUM Desa ini diharapkan menjadi suatu wadah pembinaan dan pendampingan yang akan memudahkan koordinasi dan dukungan dari stakeholder untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan BUM Desa. Dukungan yang diberikan dapat berupa kebijakan anggaran, pendampingan teknis (technical Asistance), serta permodalan yang dibutuhkan oleh BUM Desa. Diharapkan dengan adanya layanan Klinik BUM Desa dapat bermanfaat sebagai media sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta pada akhirnya dapat memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen badan usaha milik desa.	
9	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Jemput Bola Lewat Hp (Si Jempol Leha)	Pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan terkait dengan dan latar belakang mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. dalam pengamatan yang telah dilakukan di Kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan rangat kabupaten indragiri hulu saat ini masih terdapat permasalahan mengenai sebuah kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan. Masalah yang ditemui saat masyarakat ini melakukan kepengurusan administrasi sebanyak masyarakat yang belum paham persyaratan apa saja yang harus di bawa. ada juga sebuah masalah di kecamatan rangat sepeerti lambatnya pelayanan administrasi dikcamatan, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) terjadinya penumpukan berkas/dokumen, surat-menyurat, kurang nya informasi	
10	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Slrt) Indragiri Hulu Sejahtera	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (selanjutnya disebut SLRT) ditetapkan sebagai salah satu sasaran di Bidang Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan SLRT ini diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sistem Layanan Rujukan Terpadu merupakan Sistem yang mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di kabupaten Indragiri Hulu serta menghubungkannya dengan rujukan kepada pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Indragiri Hulu ataupun Pemerintahan Pusat. Sistem Layana Rujukan Terpadu (SLRT) juga mampu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan masyarakat ntuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik dan terarah. Kelompok sasaran utama SLRT adalah: antara Lain : 1. Kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM). 2. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain.	
11	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Peberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Pangan Di Kecamatan	Inovasi ini adalah dengan memberdayakan masyarakat yang digunakan sebagai monitoring, pengukuran dan pemindaian seluruh unsur masyarakat. Diharapkan melalui aksi perubahan ini menghasilkan banyak manfaat,yaitu : 1.Manfaat bagi Organisasi Dengan Inovasi yang dirancang dapat meningkatkan peran masyarakat terhadap ketahanan pangan di kecamatan Lubuk Batu Jaya 2.Manfaat bagi Masyarakat Dengan terbentuknya kelompok tani dapat bermanfaat untuk meningkatkan keejahteraan masyarakat di kecamatan Lubuk Batu Jaya sesuai target indicator kinerja yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Batu Jaya	
12	Tuah Ikm	Kegiatan TUAH IKM diawali dengan mengaktifkan kembali gedung promosi yang ada di Kota Rengat dan sekaligus dijadikan pusat penjualan oleh-oleh khas Indragiri Hulu dan Cafe IKM.Tujuan inovasi ini yaitu Untuk mencari langkah-langkah produktif melalui kegiatan yang inovatif dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang solitif sehingga dapat mengatur strategi dalam menata usaha para pelaku IKM hingga mendapatkan peningkatan hasil dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dengan adanya program dari TUAH IKM maka pelaku IKM mendapat kesempatan untuk mempromosikan produknya dan meningkatkan penjualan produk, serta mendapatkan kesempatan untuk difasilitasi dengan lembaga/organisasi terkait. Program TUAH IKM telah memberikan kesempatan untuk mempromosikan jenis produk-produk kepada pelaku IKM yang sebelumnya belum mendapatkan pemasaran yang luas serta membantu Pelaku IKM mengembangkan produknya baik dari segi kemasan produk dsb agar memiliki potensi yang lebih baik dan layak untuk dipasarkan ke masyarakat luas.	
13	Seroja (Sistem Elektronik Pajak Daerah) Layanan Mandiri Untuk Wajib Pajak	Pelayanan Pajak Daerah dengan Aplikasi Sistem Elektronik Pajak Daerah (SEROJA) diperkuat dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah (SEROJA). Berdasarkan hal tersebut, maka disusun pelayanan pajak daerah dengan Sistem Elektronik Pajak Daerah (SEROJA) sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah. Tujuan inovasi pelayanan pajak daerah dengan Aplikasi SEROJA. 1. Melaksanakan pelayanan pajak daerah dengan Aplikasi SEROJA. 2. Membiasakan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi dalam layanan pajak daerah menuju era digitalisasi. 3. Memberikan informasi dan edukasi pada wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah dengan menggunakan Aplikasi SEROJA. 4. Membantu wajib pajak dalam melaksanakan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak daerah. 5. Memastikan setiap wajib pajak yang melakukan pelayanan pajak daerah dengan menggunakan Aplikasi SEROJA.	
14	Slims (Serayan Library Management System)	Program SLIMS merupakan sistem informasi perpustakaan yang digunakan baik di perpustakaan pendidikan maupun komersial di seluruh Indonesia. Keberadaan komunitas yang tersebar hampir diseluruh Indonesia dalam aktivitas yang cukup normal mendukung penggunaan aplikasi ini, memungkinkan kami untuk mengatasi masalah aplikasi dan berbagi informasi terbaru dari aplikasi ini dengan tepat. Kinerja SLIMS di Perpustakaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berpotensi meningkatkan kualitas perpustakaan secara keseluruhan, khususnya di area sirkulasi. Hal ini dikarenakan salah satu indikator keberhasilan Perpustakaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah pelayanan peminjaman yang baik. Meminjam, mengembalikan, dan memperbaharui merupakan contoh kegiatan jasa. Ketiga tindakan ini biasanya dilakukan oleh pengunjung perpustakaan dalam rangka mendukung jumlah pengunjung perpustakaan. Alhasil, aplikasi SLIMS diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas layanan di area ini. Dimulai dengan sistem pembelian bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, sistem temu kembali bahan pustaka, sistem sirkulasi, keanggotaan, penetapan biaya keterlambatan, dan sistem pelaporan kegiatan perpustakaan, sistem komputerisasi perpustakaan yang baik terintegrasi dengan banyak kriteria pilihan. Salah satu contoh sistem perpustakaan terkomputerisasi yang mencakup kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan perpustakaan, termasuk pengadaan, pemrosesan, penelusuran, administrasi anggota, dan sirkulasi.	

15	Pelayanan Air Limbah Domestik Melalui Aplikasi "SIBAUNG" Dengan Melaksanakan Tahapan Penerapan SPM	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar berlandaskan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman kepada Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan Paket Kebijakan Strategi Sanitasi Kabupaten "SIBAUNG INHU" sebagai berikut: <input type="checkbox"/> Kampanye hidup bersih dan sehat <input type="checkbox"/> Penghargaan bupati untuk camat dan kepala desa/lurah yang wilayah sudah ODF <input type="checkbox"/> Pembangunan tangki septik individual untuk MBR <input type="checkbox"/> Subsidi penyedotan tangki septik untuk MBR <input type="checkbox"/> Pembangunan sarana prasarana PALD <input type="checkbox"/> Bersama kita bisa (pemanfaatan sumber pendanaan lainnya) <input type="checkbox"/> Dana desa untuk sanitasi <input type="checkbox"/> Sampah di tangani sampah di kurangi (SAMT ANGKUR) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Penerapan SPM ini dijadikan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Urusan Pemerintahan W aji yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan ditentukan dengan Standar Pelayanan Minimal. Sejalan dengan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan Paket Kebijakan Strategi Sanitasi Kabupaten Indragiri Hulu "SIBAUNG INHU", maka diperlukan upaya untuk memprioritaskan Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik karena masih tingginya gap pencapaian SPM air limbah domestik di Kabupaten Indragiri Hulu. untuk mengatasi permasalahan tersebut kita Membangun Sistem berbasis Web dan Android untuk mempermudah proses pelaksanaan tahapan penerapan SPM yaitu melalui "SIBAUNG" (Sanitasi Berkelanjutan Aman Untuk NeGerI). Aplikasi SIBAUNG ini merupakan sistem untuk mempermudah pelaksanaan proses tahapan penerapan SPM Air Limbah Domestik. Hasil dari inovasi : <input type="checkbox"/> Data Calon Penerima Manfaat Pelayanan Air Limbah Domestik by name, by address sesuai Standar Teknis SPM Air Limbah Domestik <input type="checkbox"/> Rencana Pemenuhan Pelayanan Air Limbah Domestik <input type="checkbox"/> Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Air Limbah Domestik <input type="checkbox"/> Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	
16	Peningkatan Kinerja Pembangunan Infrastruktur Dengan Membangun Sistem Informasi Sarana Dan Prasarana Terintegrasi Berbasis Web-Gis	Biaya pembangunan infrastruktur sangat tinggi sedangkan kemampuan keuangan daerah sangatlah minim. Skala prioritas pembangunan diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai efektifitas kerja yang tinggi, selain itu pencarian potensi pendanaan lain sangat diperlukan dalam pencapaian rencana kerja serta peningkatan kelengkapan dan keakuratan data pembangunan. Berdasarkan tabel dan grafik yang disampaikan terlihat trend penurunan angka kinerja pelayanan/hal ini bisa terjadi karena banyak faktor. Kesalahan dalam pengalokasian anggaran ataupun kekurangan anggaran adalah salah satu faktor penyebabnya. Sangat diperlukan perencanaan yang baik dan pencarian sumber- sumber pendanaan lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan dan merealisasikan diperlukan sumber daya manusia yang baik dan alat bantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dapat memudahkan pencapaian rencana pembangunan. Diharapkan melalui aksi perubahan ini menghasilkan peningkatan kinerja pembangunan Infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui proses perencanaan yang baik, selain itu dengan ketersediaan data dan proses perencanaan yang baik pemerintah dapat mencari sumber-sumber pendanaan lain dikarenakan data-data yang diminta sebagai readiness criteria telah terpenuhi. Secara umum Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Terintegrasi Berbasis Web GIS akan menunjang penyebaran informasi data spatial dan menjawab permasalahan akan data-data yang ada hal ini dikarenakan media penyimpanan dan dapat diakses secara online, sehingga orang awam pun akan dapat memiliki akses terhadap data dan hasil analisis GIS.	
17	Optimalisasi Pengelolaan Ruang Rapat Melalui Aplikasi Digital Ruang Rapat (E – Rapat)	Dalam rangka pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Pengelolaan Ruang Rapat pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah terobosan inovasi yang menjadi rencana Aksi Perubahan yaitu Optimalisasi Pengelolaan Ruang Rapat melalui aplikasi Digital Ruang Rapat (E-RAPAT) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya diharapkan penggunaan aplikasi dapat mengatasi permasalahan terhadap pengelolaan Ruang Rapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. Manfaat bagi Perangkat Daerah/Organisasi 1.Memberikan Kemudahan dalam Proses Peminjaman Ruang Rapat menjadi lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara Digital. 2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi kegiatan/Agenda 3.Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi Fasilitas Ruang Rapat Sarana dan Prasarana yg ada. Manfaat bagi Uni Kerja 1.Terwujudnya Informasi Acara Atau Agenda Kegiatan Secara keseluruhan Baik internal maupun Eksternal 2.Terwujudnya Ketertiban Pemakaian Ruang Rapat dan Memudahkan dalam Pembuatan Laporan.	
18	Optimalisasi Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Melalui Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI-LAPKEU)	Dalam rangka pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Penatausahaan keuangan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah terobosan inovasi yang menjadi rencana Aksi Perubahan yaitu Optimalisasi Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan melalui Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI-LAPKEU) selanjutnya diharapkan penggunaan aplikasi dapat mengatasi permasalahan terhadap pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu. Manfaat Bagi Organisasi Perangkat Daerah/Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki aplikasi khusus keuangan sehingga mempermudah mengontrol pengelolaan keuangan dariseluruh bidang-bidang sehingga penyampaian laporan keuanganoleh bendahara dan menjadi tertib dan sesuai dengan ketentuan.	
19	Pusat Pembelajaran Keluarga Soenara	Manfaat dibentuknya puspaga adalah sebagai berikut: meningkatkan kualitas dalam hal mengasuh dan melindungi anak, mengembangkan anak sesuai minat dan bakatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter pada anak. Tujuan dibentuknya PUSPAGA : 1.Tersedianya one stop service Layanan Satu Pintu Keluarga. Holistik,Integratif Berbasis Hak Anak. 2. Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendampinganbagi orang tua, calon orang tua dan orang yang bertanggungjawabterhadap anak. 3. Tersedianya tempat konsultasi dan konseling bagi anak, orangtua dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak. 4. Tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusibagipermasalahan anak dan keluarga. 5. Menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. 6. Menguatkan sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.	
20	Desa Bersih Narkoba	Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menjadikan desa sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan desa memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tercatat sampai dengan Mei 2019, jumlah desa di Indonesia yaitu 74.950 desa dan 8.479 kelurahan. Dengan data tersebut apabila semua masyarakat dan pemerintah daerah/pemerintah desa ikut bergerak dan terlibat dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diyakini akan mampu menurunkan angka prevalensi dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu, perlunya sinergitas dan dukungan dari Pemerintah Daerah / Pemerintah Desa yang perannya strategis dan sangat penting dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di desa/kelurahan. Tujuan inovasi ini yaitu Untuk Menciptakan Kondisi Aman Dan Tertib Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan Sehingga Masyarakat Desa Bersih Dari Penyalahgunaan Narkoba. Mengimplementasikan Program P4GN dalam terwujudnya pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.	
21	Percepatan Penurunan Angka Stunting	Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 dari 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah, beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Diantaranya pola hidup sehat baik bagi ibu hamil maupun anaknya hingga lingkungan sekitar , selain itu pola asuh anak juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam rangka program Getus Stunting (Gerakan T erpadu Cegah Stunting) perlu ditetapkan Program dan Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kecamatan Sungai Lala. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Sungai Lala menetapkan Program Budidaya Ikan Lele, Gerakan Makan Telur dan Minum Susu Bersama Balita se Kecamatan Sungai Lala. Gizi pada anak terpenuhi sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global serta menghasilkan anak yang sehat dan mempunyai kecerdasan yang baik.	
2024			
1	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Slrt) Indragiri Hulu Sejahtera	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (selanjutnya disebut SLRT) ditetapkan sebagai salah satu sasaran di Bidang Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan SLRT ini diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sistem Layanan Rujukan Terpadu merupakan Sistem yang mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di kabupaten Indragiri Hulu serta menghubungkannya dengan rujukan kepada pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Indragiri Hulu ataupun Pemerintahan Pusat. Sistem Layana Rujukan Terpadu (SLRT) juga mampu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan masyarakat ntuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik dan terarah. Kelompok sasaran utama SLRT adalah: antara Lain : 1. Kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 40% terendah berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM). 2. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain.	
2	Sistem Elektronik Pajak Daerah (Seroja)	Pelayanan Pajak Daerah dengan Aplikasi Sistem Elektronik Pajak Daerah (SEROJA) diperkuat dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah (SEROJA). Berdasarkan hal tersebut, maka disusun pelayanan pajak daerah dengan Sistem Elektronik Pajak Daerah (SEROJA) sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah. Tujuan inovasi pelayanan pajak daerah dengan Aplikasi SEROJA. 1. Melaksanakan pelayanan pajak daerah dengan Aplikasi SEROJA. 2. Membiasakan Wajib Pajak menggunakan Aplikasi dalam layanan pajak daerah menuju era digitalisasi. 3. Memberikan informasi dan edukasi pada wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah dengan menggunakan Aplikasi SEROJA. 4. Membantu wajib pajak dalam melaksanakan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak daerah. 5. Memastikan setiap wajib pajak yang melakukan pelayanan pajak daerah dengan menggunakan Aplikasi SEROJA.	
3	Layanan Gerak Keliling (Gerak)	Target Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu : <input type="checkbox"/> Target dari Program Pelayanan Penanaman Modal adalah menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh aparat DPMTSP dengan target 87,2 point; <input type="checkbox"/> Target dari Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara T erpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Y ang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah menyajikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan sebanyak 2 laporan; Target dari Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada pelaku usaha sebanyak 360 pelaku usaha. Maksud pelaksanaan pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan T erpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik sebagai pedoman untuk mengeloa serta menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK). Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Pelayanan T erpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah memberikan layanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha Mikro Kecil (UMK) pada tiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko T erintegrasi Secara Elektronik (OSS-RBA) dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk pengumpulan data pelaku usaha UMK yang belum memiliki perizinan berusaha.	

4	Percepatan Stunting	Penurunan Angka	Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 dari 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Diantaranya pola hidup sehat baik bagi ibu hamil maupun anaknya hingga lingkungan sekitar , selain itu pola asuh anak juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam rangka program Getus Stunting (Gerakan T erpadu Cegah Stunting) perlu ditetapkan Program dan Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kecamatan Sungai Lala. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Sungai Lala menetapkan Program Buddidaya Ikan Lele, Gerakan Makan Telur dan Minum Susu Bersama Balita se Kecamatan Sungai Lala. Gizi pada anak terpenuhi sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global serta menghasilkan anak yang sehat dan mempunyai kecerdasan yang baik.	
5	Pendamping Koperasi Dan UMKM		Pendamping Koperasi dan UMKM adalah program layanan yang memberikan pendampingan kepada koperasi dan UMKM sesuai dengan wilayah kerjanya. tenaga pendamping adalah pegawai Non ASN yang telah memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan pendampingan bagi koperasi dan UMKM pasca diberikan pelatihan. Di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 14 Kecamatan dengan 303 jumlah koperasi dan lebih kurang 500 pelaku usaha (UMKM) yang menjadi binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu. Semua koperasi dan UMKM harus selalu dibina dan dibimbing guna peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan kemajuan UMKM kedepannya. Tujuan inovasi pendamping koperasi dan UMKM bagaimana membuat koperasi yang sehat serta UMKM naik kelas dari mikro menjadi kecil. Manfaat yang diperoleh dengan adanya pendamping koperasi dan UMKM adalah : <input type="checkbox"/> Koperasi dan UMKM dapat berkembang dan berinovasi demi kemajuan koperasi dan UMKM kedepannya. <input type="checkbox"/> Dengan keberadaan tenaga pendamping di Kecamatan dapat menyampaikan informasi terkini kepada koperasi dan UMKM Hasil inovasi pendamping koperasi dan UMKM adalah terwujudnya koperasi dan UMKM yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.	
6	Apar		Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 2 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 T ahun 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pengadaman Pemadam Kebakaran. Menunjuk Tim Pemeriksa dan Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada kantor penanggulangan bencana daerah kabupaten Indragiri Hulu. sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati Indragiri Hulu. Pemeriksa Alat Pemadam Api Ringan(APAR) sebagaimana dimaksud Diktu kesatu memiliki tugas sebagai berikut :Mensosialisasikan peraturan terkait Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (AP AR, Menghitung jumlah alat Pemadam Api Ringan(AP AR) yang layak fungsi dan yang tidak layak fungsi Melakukan, pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan(AP AR), Membuat surat layak pakai. Hasil inovasi yang di dapat ; Menambah Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (P AD), Kegiatan ini juga mendukung SPM (Standar Pelayanan Minimal)Krantor Penanggulangan Bencana Daerah Indragiri Hulu Susai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 T ahun 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TENKOTA yaitu jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana, dan mendukung kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat dan dunia usaha.	
7	Tuah Ikm		Kegiatan TUAH IKM diawali dengan mengaktifkan kembali gedung promosi yang ada di Kota Rengat dan sekaligus dijadikan pusat penjualan oleh-oleh khas Indragiri Hulu dan Cafe IKM.Tujuan inovasi ini yaitu Untuk mencari langkah-langkah produktif melalui kegiatan yang inovatif dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang solutif sehingga dapat mengatur strategi dalam menata usaha para pelaku IKM hingga mendapatkan peningkatan hasil dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dengan adanya program dari TUAH IKM maka pelaku IKM mendapat kesempatan untuk mempromosikan produknya dan meningkatkan penjualan produk, serta mendapatkan kesempatan untuk difasilitasi dengan lembaga/organisasi terkait. Program TUAH IKM telah memberikan kesempatan untuk mempromosikan jenis produk-produk kepada pelaku IKM yang sebelumnya belum mendapatkan pemasaran yang luas serta membantu Pelaku IKM mengembangkan produknya baik dari segi kemasan produk dsb agar memiliki potensi yang lebih baik dan layak untuk dipasarkan ke masyarakat luas.	
8	Sistem Informasi Geografis Pbb Objek Perdesaan Perkotaan Indragiri (Sigap Bujang)		-	
9	Inovasi Pelayanan Publik Melalui Klinik Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Indahnya Inhu)		Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Indragiri Hulu Badan perencanaan Pembangunan Daerah perlu membuat inovasi daerah. inovasi pelayanan publik melalui pembinaan klinik inovasi daerah kabupaten indragiri hulu (INDAHNYa INHU) dilaksanakan untuk konsultasi, evaluasi, pendampingan dan implemetasi inovasi daerah bagi perangkat daerah di kabupaten indragiri hulu. Klinik inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (INDAHNYa INHU) suatu inovasi yang akan direalisasikan guna menunjang kegiatan pelayanan konsultasi, evaluasi, pendampingan dan implementasi inovasi daerah di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu, terbentuknya klinik INDAHNYa INHU menjadi salah satu milestone yang sangat penting, dengan adanya klinik ini perangkat daerah sudah dapat berkonsultasi langsung ke klinik pada jadwal pelayanan yang sudah ditentukan. novasi daerah badan perencanaan pembangunan daerah dapt mencakup berbagai bidang seperti pengembangan metode perencanaan yang lebih partisipatif, pemanfaatan informasi dan komunikasi, pengembangan model keuangan inovatif dan promosi kewirausahaan dan ekonomi kreatif, pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan dan sektor swasta dalam perencanaan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan akomodatif Hasil dari inovasi ; Optimal nya pelayanan publik terkait inovasi daerah di Kabupaten Indragiri Hulu; Meningkatnya keterisian indikator di satuan inovasi daerah; Terlaksananya layanan komunikasi, evaluasi dan pendampingan dan implementasi inovasi daerah bagi perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.	
10	Webinar Belajar Bulanan [Bebuai]		Pandemi Covid19 mengajarkan kita untuk berubah, baik tentang perilaku hidup bersih tapi juga perilaku dalam bekerja, dan perkembangan teknologi semakin maju dan pesat, pemerintah daerah harus bisa mampu mengikuti perkembangannya teknologi tersebut, salah satunya Berkembangnya T eknologi dalam Hal Komunikasi dan pembelajaran, kalau dahulu, pembelajaran banyak menggunakan Ruang kelas dan tatap muka saat ini lebih menggunakan E-learning atau tatap maya, hal ini tidak mengurangi kaidah tentang pengembangan kompetensi ASN. Bebuai ini sudah di Mulai sejak 2021 namun masih bersifat percobaan, dan tahun 2022 mulai terus dikembangkan, dan 2023 alhamdulillah berjalan sangat baik, dan 2024 terus dievaluasi dan dikembangkan lebih baik lagi. Hasil yang didapat dari kegiatan BEBUAI adalah : Pengembangan Kompetensi ASN Unggul Berdaya Saing; Media Informasi yang mudah diikuti dari mana pun dan dapat dilihat Kembali kapan pun karna setiap kegiatan sudah ditayangkan di youtube BKPPD Kabupaten Indragiri Hulu; Media Sosialisasi yang Efektif dan Efisien, karna minim Anggaran dan dapat terealisasi dengan segera Menjadi salah satu media Motivasi bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat meningkatkan Kinerja dalam Berkerja.	
11	Inovasi Gerak Masyarakat Cegahkehamilan Resiko Tinggi (CEMIL ROTI)		Dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh kehamilan risiko tinggi, telah muncul gerakan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko kehamilan tersebut. Gerakan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, tenaga medis, pemerintah, dan organisasi kesehatan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran setiap individu dalam mengurangi risiko kehamilan yang berpotensi berbahaya. T ujuan dari gerakan ini didasari oleh Undang – Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dan bukan hanya sekedar mengedukasi tentang risiko kehamilan tinggi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perawatan prenatal yang tepat, pola makan sehat, hidup sehat, dan perencanaan kehamilan yang bijaksana. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi angka komplikasi dan kematian yang disebabkan oleh kehamilan risiko tinggi, serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan janin. Selain itu, gerakan ini juga berfokus pada penguatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi kelompok-kelompok yang lebih rentan dan kurang mampu. Penyuluhan mengenai kehamilan risiko tinggi dan upaya pencegahannya tidak hanya ditujukan kepada calon ibu, tetapi juga kepada anggota keluarga, lingkungan sosial, dan komunitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi kehamilan yang sehat bagi setiap wanita. Dengan terlaksanannya semua milestone dalam rencana aksi, maka tujuan jangka pendek telah dicapai, yaitu T erlaksananya launching Gerakan Masyarakat Cegah Kehamilan Resiko T inggi (CEMIL ROTI) di Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kelompok penggerak percepatan program keluarga berencana di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan tercapainya tujuan jangka pendek di atas, maka tujuan jangka menengah yaitu terlaksananya Gerakan Masyarakat CEMIL ROTI dan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Gerakan Masyarakat CEMIL ROTI di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan akan terus memperbaiki segala kekurangan pelayanan .	
12	Upaya Peningkatan Kunjungan Wisata Melalui Pembentukan Desa Wisata Di Kabupaten Indragiri Hulu		Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan merupakan aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan serta dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut. desa wisata memiliki beberapa kriteria antaranya : Memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga mudah untuk dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. memiliki banyak objek menarik baik berupa alam, legenda, seni budaya, makanan lokal dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata, masyarakat dan aparat desannya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. keamanan desa tersebut terjamin. tersedianya akomodasi, telekomunikasi serta tenaga kerja yang memadai, memiliki iklim yang sejuk dan dingin, berbubungan denaga objek wisata lain yang telah banyak dikenal oleh masyarakat luas. sejalan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengaskan bahwa desa diakui hak asal-usul dan hak tradisionalnya di dalam pengaturan dan pengurusan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan pariwisata secara langsung akan menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, pengembangan pariwisata memiliki potensi manfaat yang sangat besar bagi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Pengembangan desa wisata nantinya juga tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal, masyarakat lokal nantinya akan berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan, mulai dari perencanaan, pengawasan dan implementasian.	

13	Optimalisasi Proses Perumusan Standar Satuan Harga (SSH) Melalui Digitasi Pengajuan, Verifikasi Dan Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) Di Kabupaten Indragiri	penggunaan anggaran dan mencegah potensi penyalahgunaan, Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Memainkan peran penting dalam menetapkan standar satuan harga. standar satuan harga yang baik dan terperinci akan menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa diseluruh instansi pemerintah daerah, dan akan membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Proses perumusan standar satuan harga adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan harga rata-rata atau acuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa disuatu organisasi atau instansi. perumusan standar satuan harga pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik. standar satuan harga yang jelas dan akurat akan membantu menghindari praktik korupsi, meminimalkan risiko pemborosan, dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif. proses perumusan standar satuan harga yang saat ini berjalan di BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu masih dilakukan secara manual, proses ini mengalami masalah-masalah , diantaranya, belum efektifnya proses pengajuan, verifikasi dan penetapan standar satuan harga (SSH). Kesulitan dalam penentuan standar satuan harga karena kompleksitas pekerjaan, fluktuasi harga dan inflasi mengakibatkan perbedaan signifikan antara estimasi awal dan biaya aktual. setelah melakukan analisis menggunakan metode tapisan (Mc Namara) APKL (Aktual, problematik, khalayak, dan layak) maka dipilih satu masalah yang memiliki nilai tertinggi yaitu masalah "belum efektifnya proses pengajuan, verifikasi dan penetapan standar satuan harga (SSH)". Dan setelah melakukan identifikasi penyebab dan akar permasalahan maka di ajukan inovasi guna mengatasi masalah tersebut. Inovasi yang di ajukan yaitu melaksanakan optimalisasi proses perumusan standar satuan harga (SSH) melalui digitasi pengajuan, verifikasi dan penetapan standar satuan harga (SSH) . Dengan digitasi ini proses standar satuan harga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan meningkatkan akurasi data dan meminimalisir kesalahan serta menciptakan akuntabilitas data.	
14	Aplikasi Si-Atan Beda Raka	Tim kerja yang akan membantu dan memastikan melaksanakan aksi perubahan berlangsung dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan jangka pendek sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Setiap Tim Kerja akan diperkuat dengan Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga jelas tanggung jawab dan peran masing-masing anggota yang terlibat di dalam T im. □ Tim penyusunan Rancangan program kegiatan "SIATAN BEDA RAKA" adalah Tim kerja yang bertugas untuk mendesain bagaimana program kegiatan tersebut untuk mendesain bagaimana program kegiatan tersebut akan dibuat dan menu-menu apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. □ Tim Penyusun standar Operasional prosedur (SOP) PROGRAM "SIATAN. BEDA RAKA" adalah tim yang berkerja menyusun standar proses pelaporan sampai pada proses tindakan yang akan dilakukan proram "SIATAN BEDA RAKA". Tim ini yang akan turut serta turun ke stakeholde. Ketua dari Tim ini adalah kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dan didukung oleh pejabat Struktural Dinas Perhubungan, Pelaksanaan dan tenaga harian Lepas di Dinas Perhubungan kabupaten Indragiri Hulu. Tim Perumusan Adendum peraturan Bupati tentang program Kepala Bidang lalu Lintas dan dengan melibatkan Tim Revisi Adendum peraturan bupati dari Bagian Hukum Sekretariat daerah kabupaten Indragiri Hulu.	
15	Aplikasi E-Kerjasama Media	Aplikasi e-kerjasamamedia oleh Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu, harapannya aplikasi ini dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Aplikasi e-kerjasamamedia dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerjasama antara perangkat daerah dengan perusahaan pers. Dengan adanya aplikasi ini, seluruh proses dari pengajuan hingga pembuatan MoU dapat dilakukan secara terdokumentasi dan transparan. Efisiensi Waktu dan Biaya, Proses pengajuan kerjasama perusahaan pers sebelumnya memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang besar. Dengan adanya aplikasi e-kerjasamamedia, proses pengajuan dapat dilakukan secara online dan lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Kemudahan Akses, Aplikasi e-kerjasamamedia dapat memudahkan akses bagi perusahaan pers yang ingin menjalin kerjasama dengan perangkat daerah. Perusahaan pers dapat dengan mudah mengajukan permohonan kerjasama dan memantau prosesnya melalui aplikasi ini. Meningkatkan Kualitas Kerjasama, Dengan adanya aplikasi e-kerjasamamedia, perangkat daerah dapat lebih mudah memantau dan mengontrol proses kerjasama dengan perusahaan pers. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kerjasama yang terjalin antara keduanya. Tuntutan Era Digital Di era digital seperti sekarang, penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis semakin penting. Pembuatan aplikasi e-kerjasamamedia dapat menjadi salah satu langkah awal untuk menerapkan teknologi informasi dalam proses kerjasama antara perangkat daerah dengan perusahaan pers.	
16	Slims (Senayan Management System) Library	Program SLIMS merupakan sistem informasi perpustakaan yang digunakan baik di perpustakaan pendidikan maupun komersial di seluruh Indonesia. Keberadaan komunitas yang tersebar hampir diseluruh Indonesia dalam aktivitas yang cukup normal mendukung penggunaan aplikasi ini, memungkinkan kami untuk mengatasi masalah aplikasi dan berbagi informasi terbaru dari aplikasi ini dengan tepat. Kinerja SLIMS di Perpustakaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berpotensi meningkatkan kualitas perpustakaan secara keseluruhan, khususnya di area sirkulasi. Hal ini dikarenakan salah satu indikator keberhasilan Perpustakaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah pelayanan peminjaman yang baik. Meminjam, mengembalikan, dan memperbaharui merupakan contoh kegiatan jasa. Ketiga tindakan ini biasanya dilakukan oleh pengunjung perpustakaan dalam rangka mendukung jumlah pengunjung perpustakaan. Ahasil, aplikasi SLIMS diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas layanan di area ini. Dimulai dengan sistem pembelian bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, sistem temu kembali bahan pustaka, sistem sirkulasi, keanggotaan, penetapan biaya keterlambatan, dan sistem pelaporan kegiatan perpustakaan, sistem komputerisasi perpustakaan yang baik terintegrasi dengan banyak kriteria pilihan. Salah satu contoh sistem perpustakaan terkomputerisasi yang mencakup kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan perpustakaan, termasuk pengadaan, pemrosesan, penelusuran, administrasi anggota, dan sirkulasi.	
17	Pelayanan Air Limbah Domestik Melalui Aplikasi "SIBAUNG" Dengan Melaksanakan Tahapan Penerapan SPM	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar berlandaskan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman kepada Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan paket Kebijakan Strategi Sanitasi Kabupaten "SIBAUNG INHU" sebagai berikut: Kampanye hidup bersih dan sehat. Penghargaan bupati untuk camat dan kepala desa/lurah yang wilayah sudah ODF; Pembangunan tangki septik individual untuk MBR; Subsidi penyediaan tangki septik untuk MBR; Pembangunan sarana prasarana PALD; Bersama kita bisa (pemanfaatan sumber pendanaan lainnya); Dana desa untuk sanitasi; Sampah di tangani sampah di kurangi (SAMT ANGKUR). Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Penerapan SPM ini dijadikan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Urusan Pemerintahan W ajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan ditentukan dengan Standar Pelayanan Minimal. Sejalan dengan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan Paket Kebijakan Strategi Sanitasi Kabupaten Indragiri Hulu "SIBAUNG INHU", maka diperlukan upaya untuk memprioritaskan Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik karena masih tingginya gap pencapaian SPM air limbah domestik di Kabupaten Indragiri Hulu. untuk mengatasi permasalahan tersebut kita Membangun Sistem berbasis Web dan Android untuk mempermudah proses pelaksanaan tahapan penerapan SPM yaitu melalui "SIBAUNG" (Sanitasi Berkelanjutan Aman Untuk NeGen). Aplikasi SIBAUNG ini merupakan sistem untuk mempermudah pelaksanaan proses tahapan penerapan SPM Air Limbah Domestik. Hasil dari inovasi : Data Calon Penerima Manfaat Pelayanan Air Limbah Domestik by name, by address sesuai Standar Teknis SPM Air Limbah Domestik; Rencana Pemenuhan Pelayanan Air Limbah Domestik; Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Air Limbah Domestik; dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.	
18	Sepeda [Sistem Pengelola Database Berbasis Digital]	Dinas Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data yang berkualitas tinggi. Data yang efisien dan terstruktur dapat berperan kunci dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Beberapa masalah yang pernah terjadi di Dinas Ketahanan Pangan terkait sulitnya mendapatkan data adalah ketika BPK melakukan pemeriksaan data barang milik daerah terkait cadangan beras pemerintah yang ada di Dinas Ketahanan Pangan. Namun pada saat dibutuhkan konfirmasi dari Kepala Bidang atau yang bertanggung jawab terhadap data tersebut ternyata tidak berada di tempat. Selanjutnya adanya permintaan data statis oleh Dinas Perpustakaan dan arsip tentang SK Pimpinan yang pernah menjabat di Dinas Ketahanan Pangan. Namun dalam hal ini juga sulit dipenuhi karena data pimpinan yang lama atau beberapa tahun kebelakang sudah tidak tersimpan di lemari arsip. Hal sederhana itu pun sulit dipenuhi karena penyimpanan yang masih manual dan arsip lama susah ditemukan dan tidak tau dimana keberadaanya. Begitu juga ada permintaan data dari Diskominfo tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang ada di Dinas Ketahanan Pangan. Ketika adanya permintaan data, kasubag umum harus meminta daftar dari setiap bidang tentang data atau informasi apa saja yang dikeluarkan oleh bidang tersebut. T idak hanya itu, setelah daftar dibuat Kasubag Umum harus memastikan data-data yang ada dalam daftar benar-benar ada fisiknya, bukan hanya sekedar daftar sehingga kasubag umum harus mengumpulkan softcopy sesuai daftar yang dibuat. Dan ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Penyebab masalah-masalah tersebut diantaranya adalah karena belum tersedianya sistem pengelolaan database organisasi berbasis digital, kurangnya kompetensi ASN tentang pengelolaan database organisasi, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan database organisasi. Belum efektifnya pengelolaan database tersebut dapat dilihat dari banyaknya data/dokumen penting yang hilang, keterlambatan dalam pengaksesan data, dan ketidakpastian kualitas data. Dengan kondisi data/dokumen yang tidak terjaga dengan baik dapat berdampak negatif pada keputusan yang diambil berdasarkan informasi.	
19	Simaster	Dalam mengatasi permasalahan stunting, Pemerintah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Prevalensi Stunting Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2020 sebesar 29,6% dan pada tahun 2021 menjadi 23,6%, pada tahun 2022 prevalensi stunting 16,7% dan berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting tahun 2023 adalah 12,7%. Dalam meningkatkan upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Indragiri Hulu. Kondisi saat ini, ketersediaan publikasi data dan informasi stunting masih terlaksana secara konvensional sehingga sulit untuk diakses, ketersediaan data stunting masih sulit untuk di akses, begitupun dengan publikasi data stunting hasil pengukuran yang terlaksana secara manual dengan menempelkan hasil pengukuran pada posyandu, kantor desa/kelurahan atau kantor kecamatan, kondisi ini menggambarkan belum optimalnya strategi dalam percepatan penurunan stunting. Kondisi yang diharapkan adalah terdapat sistem informasi stunting yang berbasis teknologi terintegrasi yang memiliki data yang valid dan mutakhir , agar akses terhadap ketersediaan data dan informasi stunting, sehingga dengan mudah didapatkan oleh instansi pemerintah atau stakeholders dan masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan dan pengelolaan program atau kegiatan pencegahan dan penurunan stunting. Berdasarkan latar belakang tersebut, isu strategis yang diangkat adalah sulitnya akses terhadap publikasi data dan informasi stunting. Oleh sebab itu, dilakukan terobosan inovasi dengan membangun sistem informasi stunting berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan data dan informasi stunting secara terintegrasi dalam mengoptimalkan strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Indragiri Hulu melalui teknologi "Sistem Informasi Stunting Terintegrasi (SIMASTER)".	
20	Optimalisasi Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Melalui Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI-LAPKEU)	Dalam rangka pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Penatausahaan keuangan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu terobosan inovasi yang merajutnya Aksi Perubahan yaitu Optimalisasi Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan melalui Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI-LAPKEU) selanjutnya diharapkan penggunaan aplikasi dapat mengatasi permasalahan terhadap pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu. Manfaat Bagi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki aplikasi khusus keuangan sehingga mempermudah mengontrol pengelolaan keuangan dari seluruh bidang-bidang sehingga penyampaian laporan keuangan oleh bendahara dan menjadi terbit dan sesuai dengan ketentuan.	

21	Optimalisasi Pengelolaan Ruang Rapat Melalui Aplikasi Digital Ruang Rapat (E – Rapat)	Dalam rangka pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Pengelolaan Ruang Rapat pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah terobosan inovasi yang menjadi rencana Aksi Perubahan yaitu Optimalisasi Pengelolaan Ruang Rapat melalui aplikasi Digital Ruang Rapat (E-RAPAT) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya diharapkan penggunaan aplikasi dapat mengatasi permasalahan terhadap pengelolaan Ruang Rapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. Manfaat bagi Perangkat Daerah/Organisasi 1. Memberikan kemudahan dalam Proses Peminjaman Ruang Rapat menjadi lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara Digital. 2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi kegiatan/Agenda 3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi Fasilitas Ruang Rapat Sarana dan Prasarana yg ada. Manfaat bagi Unit Kerja 1. Termuatnya Informasi Acara Atau Agenda Kegiatan Secara keseluruhan Baik internal maupun Eksternal 2. Terwujudnya Ketertiban Pemakaian Ruang Rapat dan Memudahkan dalam Pembuatan Laporan.	
22	Peningkatan Kinerja Pembangunan Infrastruktur Dengan Membangun Sistem Informasi Sarana Dan Prasarana Terintegrasi Berbasis Web Gis	Biaya pembangunan infrastruktur sangat tinggi sedangkan kemampuan keuangan daerah sangatlah minim. Skala prioritas pembangunan diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai efektivitas kerja yang tinggi, selain itu pencarian potensi pendanaan lain sangat diperlukan dalam pencapaian rencana kerja serta peningkatan kelengkapan dan keakuratan data pembangunan. Berdasarkan tabel dan grafik yang disampaikan terlihat trend penurunan angka kinerja pelayanan, hal ini bisa terjadi karena banyak faktor. Kesalahan dalam pengalokasian anggaran ataupun kekurangan anggaran adalah salah satu faktor penyebabnya. Sangat diperlukan perencanaan yang baik dan pencarian sumber- sumber pendanaan lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan dan merealisasikan diperlukan sumber daya manusia yang baik dan alat bantu pada Badan Perencanaan Pembangunan. Daerah untuk dapat memudahkan pencapaian rencana pembangunan. Diharapkan melalui aksi perubahan ini menghasilkan peningkatan kinerja pembangunan Infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui proses perencanaan yang baik, selain itu dengan ketersediaan data dan proses perencanaan yang baik pemerintah dapat mencari sumber-sumber pendanaan lain dikarenakan data-data yang diminta sebagai readiness criteria telah terpenuhi. Secara umum Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Terintegrasi Berbasis Web GIS akan menunjang penyebaran informasi data spasial dan menjawab permasalahan akan data-data yang ada hal ini dikarenakan media penyimpanan dan dapat diakses secara online, sehingga orang awam pun akan dapat memiliki akses terhadap data dan hasil analisis GIS.	
2025			
1	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Indragiri Hulu Sejahtera	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (selanjutnya disebut SLRT) ditetapkan sebagai salah satu sasaran di Bidang Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan SLRT ini diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sistem Layanan Rujukan Terpadu merupakan Sistem yang mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di kabupaten Indragiri Hulu serta menghubungkannya dengan rujukan kepada pengelola program, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Indragiri Hulu ataupun Pemerintahan Pusat. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) juga mampu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan masyarakat ruk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik dan terarah. Kelompok sasaran utama SLRT adalah: antara Lain : Kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 40% terendah berdasarkan Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin (DT-PFPM); Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain.	
2	Webinar Belajar Bulanan [Bebul]	Pandemi Covid19 mengajarkan kita untuk berubah, baik tentang perilaku hidup bersih tapi juga perilaku dalam bekerja, dan perkembangan teknologi semakin maju dan pesat, pemerintah daerah harus bisa mampu mengimbangi berkembangnya teknologi tersebut, salah satunya Berkembangnya T eknologi dalam Hal Komunikasi dan pembelajaran, kalau dahulu, pembelajaran banyak menggunakan Ruang kelas dan tatap muka saat ini lebih menggunakan E-learning atau tatap maya, hal ini tidak mengurangi kaidah tentang pengembangan kompetensi ASN. Bebul ini sudah di Mulai sejak 2021 namun masih bersifat percobaan, dan tahun 2022 mulai terus dikembangkan, dan 2023 alhamdulillah berjalan sangat baik, dan 2024 terus dievaluasi dan dikembangkan lebih baik lagi. Hasil yang didapat dari kegiatan BEBUL adalah :Pengembangan Kompetensi ASN Unggul Berdaya Saing; Media Informasi yang mudah diikuti dari mana pun dan dapat dilihat Kembali kapan pun karena setiap kegiatan sudah ditayangkan di youtube BKPPD Kabupaten Indragiri Hulu; Media Sosialisasi yang Efektif dan Efisien, karna minim Anggaran dan dapat terealisasi dengan segera Menjadi salah satu media Motivasi bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat meningkatkan Kinerja dalam Berkerja	
3	Pendamping Koperasi Dan UMKm	Pendamping Koperasi dan UMKM adalah program layanan yang memberikan pendampingan kepada koperasi dan UMKM sesuai dengan wilayah kerjanya. tenaga pendamping adalah pegawai Non ASN yang telah memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). untuk memberikan pendampingan bagi koperasi dan UMKM pasca diberikan pelatihan. Di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 14 Kecamatan dengan 303 jumlah koperasi dan lebih kurang 500 pelaku usaha (UMKM) yang menjadi binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu. Semua koperasi dan UMKM harus selalu dibina dan dibimbing guna peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan kemajuan UMKM kedepannya. Tujuan inovasi pendamping koperasi dan UMKM bagaimana membuat koperasi yang sehat serta UMKM naik kelas dari mikro menjadi kecil. Manfaat yang diperoleh dengan adanya pendamping koperasi dan UMKM adalah : □ Koperasi dan UMKM dapat berkembang dan berinovasi demi kemajuan koperasi dan UMKM kedepannya. Dengan keberadaan tenaga pendamping di Kecamatan dapat menyampaikan informasi terkini kepada koperasi dan UMKM. Hasil inovasi pendamping koperasi dan UMKM adalah terwujudnya koperasi dan UMKM yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.	
4	Getug Stunting [Gerakan Terpadu Cegah Stunting] Di Kec. Sei. Lala	Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 dari 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Diantaranya pola hidup sehat baik bagi ibu hamil maupun anaknya hingga lingkungan sekitar , selain itu pola asuh anak juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam rangka program Getug Stunting (Gerakan T erpadu Cegah Stunting) perlu ditetapkan Program dan Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kecamatan Sungai Lala. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Sungai Lala menetapkan Program Budidaya Ikan Lele, Gerakan Makan Telur dan Minum Susu Bersama Balita se Kecamatan Sungai Lala. Gizi pada anak terpenuhi sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global serta menghasilkan anak yang sehat dan mempunyai kecerdasan yang baik.	
5	Sigap Bujang [Sistem Informasi Geografis Pbb Objek Perdesaan Perkotaan Indragiri]	Dengan kebijakan baru ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009, sejak tahun 2011 silam, BPHTB telah diserahkan oleh pemerintah pusat untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian PBB dan BPHTB saat ini telah sepenuhnya menjadi domain pemerintah daerah, dimana 100% penerimaan langsung masuk menjadi PAD. Ada beberapa kendala dimana penerimaan PBB dan BPHTB tidak sesuai dengan potensi yang kita harapkan. Kendala dan masalah BPHTB tersebut antara lain adalah : □ Data Objek Pajak yang belum sesuai dengan keadaan dengan data yang sebenarnya ada di lapangan; □ Nilai Jual Objek Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan harga pasar saat ini. Sistem Informasi Geografis adalah Sistem Informasi yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau peta yang terintegrasi dengan Database atribut. Smart Map merupakan Sistem Informasi Geografis yang menghubungkan antara Basis Data Spasial atau Peta PBB dengan Basis Data atribut wajib pajak yang terdapat dalam aplikasi SISMIOP. Masukan dasar SIG PBB berasal dari peta, foto udara, citra satelit maupun hasil survey . Melalui SIG diharapkan dapat lebih memberikan percepatan visualisasi sehingga mempermudah pengambilan keputusan. Selain itu agar menghasilkan analisis yang akurat maka masukan SIG PBB haruslah mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merasa perlu untuk dilakukan penyesuaian atau pengembangan sistem aplikasi Smart Map dengan teknologi yang ada pada saat ini, sehingga dapat membantu kinerja pegawai khususnya yang menangani Pajak bidang PBB dan BPHTB umumnya untuk semua pihak terkait dalam melakukan monitoring objek dan subjek pajak. Dalam rangka evaluasi sistem dan meningkatkan kinerja maka diperlukan inovasi dan kreatifitas dalam pembangunan aplikasi agar dapat berjalan lebih optimal sehingga Target PAD Kabupaten Indragiri Hulu dapat tercapai.	
6	Layanan Gerak Keliling (Gerak)	Target Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu :Target dari Program Pelayanan Penanaman Modal adalah menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh aparatur DPMPTSP dengan target 87,2 point; Target dari Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara T erpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Y ang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah menyajikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan sebanyak 2 laporan; Target dari Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada pelaku usaha sebanyak 360 pelaku usaha. Maksud pelaksanaan pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik sebagai pedoman untuk mengelola serta menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK). Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik adalah memberikan layanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha Mikro Kecil (UMK) pada tiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko T erintegrasi Secara Elektronik (OSS-RBA) dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk pengumpulan data pelaku usaha UMK yang belum memiliki perizinan berusaha.	
7	Bank Sampah Induk Babekah	Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. W arga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam.Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan. Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uang sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah khususnya plastik sekaligus bisa dimanfaatkan kembali (reuse). Biasanya akan di manfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat di tabung adalah yang rapi dalam hal pemotongan. Maksudnya adalah ketika ingin membuka kemasannya, menggunakan alat dan rapi dalam pemotongannya. Kemudian sudah di bersihkan atau di cuci. Ada dua bentuk tabungan di bank sampah. Y ang pertama yaitu tabungan rupiah di mana tabungan ini di khususkan untuk masyarakat perorangan. Dengan membawa sampah kemudian di tukar dengan sejumlah uang dalam bentuk tabungan. Bentuk tabungan sampah yang kedua, di sebut tabungan lingkungan. Tabungan lingkungan adalah partisipasi perusahaan dan kalangan bisnis untuk pelestarian lingkungan. T abungan ini tidak dapat di uangkan, tetapi nasabahnya akan dipublish ke media sebagai perusahaan atau kalangan bisnis yang melestarikan lingkungan. Lebih lanjut akan di berikan piagam BUMI setiap hari lingkungan hidup. hasil dari inovasi bisa berupa kerajinan masyarakat, kerajinan rumah dan sebagainya yang melalui daur ulang sampah.	

8	Apar	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 2 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pengadaan Pemadam Kebakaran. Menunjuk Tim Pemeriksa dan Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada kantor penanggulangan bencana daerah kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati Indragiri Hulu, Pemeriksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagaimana dimaksud Dikirim kesatu memiliki tugas sebagai berikut : Mensosialisasikan peraturan terkait Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (AP AR. Menghitung jumlah alat Pemadam Api Ringan (AP AR) yang layak fungsi dan yang tidak layak fungsi Melakukan pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (AP AR); Membuat surat layak pakai. Hasil inovasi yang di dapat ; Menambah Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (P AD); Kegiatan ini juga mendukung SPM (Standar Pelayanan Minimal)Krantor Penanggulangan Bencana Daerah Indragiri Hulu Susai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TENKOTA yaitu jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana; mendukung kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat dan dunia usaha.	
9	Aplikasi "SIBAUNG"	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar berlandaskan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman kepada Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan Paket Kebijakan Strategi Sanitasi Kabupaten 'SIBAUNG INHU' sebagai berikut: Kampanye hidup bersih dan sehat; Penghargaan bupati untuk camat dan kepala desa/lurah yang wilayah sudah ODF; Pembangunan tangki septik individual untuk MBR; Subsidi penyedotan tanki septik untuk MBR; Pembangunan sarana prasarana PALD; Bersama kita bisa (pemanfaatan sumber pendanaan lainnya); Dana desa untuk sanitasi; Sampah di tangani sampah di kurangi (SAMT ANGKUR) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Penerapan SPM ini dijadikan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu karena berdasarkan Rencana Pemenuhan Pelayanan Air Limbah Domestik; Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Air Limbah Domestik; dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.	
10	Cemil Roti [Cegah Kehamilan Resiko Tinggi]	Dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh kehamilan risiko tinggi, telah muncul gerakan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko kehamilan tersebut. Gerakan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, tenaga medis, pemerintah, dan organisasi kesehatan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran setiap individu dalam mengurangi risiko kehamilan yang berpotensi berbahaya. Tujuan dari gerakan ini didasari oleh Undang – Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dan bukan hanya sekedar edukasi tentang risiko kehamilan tinggi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perawatan prenatal yang tepat, pola makan sehat, hidup sehat, dan perencanaan kehamilan yang bijaksana. Selain itu, gerakan ini juga berfokus pada penguatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi kelompok-kelompok yang lebih rentan dan kurang mampu. Tujuan jangka pendek telah dicapai, yaitu Terlaksananya launching Gerakan Masyarakat Cegah Kehamilan Resiko T tinggi (CEMIL ROTI) di Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kelompok penggerak percepatan program keluarga berencana di Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan jangka menengah yaitu Terlaksananya Gerakan Masyarakat CEMIL ROTI dan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Gerakan Masyarakat CEMIL ROTI di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan akan terus memperbaiki segala kekurangan pelayanan dari segala aspek yang mencakup tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam percepatan program keluarga berencana di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga dapat menunjang tujuan jangka panjang yaitu Terwujudnya Terwujudnya Program Keluarga Berencana di Kabupaten Indragiri Hulu.	
11	Pasti [Portal Satu Data Indragiri]	Aplikasi Portal Satu Data Indragiri (PASTI) merupakan sebuah inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendukung pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi. P ASTI berfungsi sebagai platform layanan berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi penyajian data statistik sektoral secara optimal dan akurat, sehingga dapat menjadi landasan pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah daerah. Pengembangan aplikasi ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menetapkan peran penting walidata dalam menjamin kualitas, keterpaduan, dan interoperabilitas data. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab sebagai walidata statistik sektoral, termasuk dalam hal standarisasi, verifikasi, dan publikasi data sektoral. Selain itu, keberadaan PASTI turut mendukung Implementasi Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong transformasi dari sistem e-Government menuju i-Government (integrated Government), yang lebih terhubung, efisien, dan transparan. Inovasi yang dihadirkan melalui aplikasi PASTI (Portal Satu Data Indragiri) di Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan sejumlah dampak nyata dalam mendukung tata kelola data statistik sektoral di Kabupaten Indragiri Hulu. Sejak implementasinya, PASTI telah mendorong perubahan signifikan dalam menyebarkan data kepada publik maupun antar instansi. Tersedianya Portal Data Terintegrasi; Peningkatan Aksesibilitas dan Keterbukaan Informasi Publik; Penguatan Peran Walidata Daerah; dan Pengembangan Berkelanjutan Melalui Penambahan Fitur Inovatif.	